

RENCANA STRATEGIS

POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA
TAHUN 2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Politeknik ATK Yogyakarta tahun 2025-2029. Rencana Strategis merupakan dokumen yang berisi tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan, serta pengukuran capaian kinerja. Rencana Strategis ini merupakan dokumen acuan penyelenggaraan kegiatan Politeknik ATK Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 dan berdasarkan amanah dan tupoksi yang diberikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) melalui Renstra BPSDMI yang telah disusun sebelumnya. Dasar hukum Revisi Rencana Strategis 2025-2029 adalah Surat Keputusan Direktur Politeknik ATK Yogyakarta Nomor: 130 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Politeknik ATK Yogyakarta Periode Tahun 2025-2029 (Tahun Anggaran 2025). Adapun rangkaian penyusunan Rencana Strategis ini melibatkan pihak terkait dari sektor industri kulit, produk kulit/alas kaki, karet, dan plastik selaku praktisi yang mengetahui perkembangan dan kebutuhan sumber daya manusia dan teknologi pada masa yang akan datang. Selain itu, mempertimbangkan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait. Serta, mengakomodir aspirasi sivitas akademika serta dinamika yang berkembang.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen Rencana Strategis Politeknik ATK Yogyakarta tahun 2025-2029. Rencana Strategis ini bersifat dinamis dan kami menyadari adanya banyak keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu kami mohon kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan Rencana Strategis ini.

Yogyakarta, 31 Desember 2025
Direktur

Dr. Sonny Taufan

DAFTAR ISI

.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Kondisi Umum	7
1.1.1 Arah Pembangunan Industri Nasional	7
1.1.2 Pembangunan SDM Industri	13
1.2 Potensi dan Tantangan	15
1.2.1 Potensi dan Tantangan Umum	15
1.2.2 Potensi dan Tantangan Khusus	18
1.2.3 Kinerja Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki Tahun 2020-2024	21
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM.....	23
2.1 Visi BPSDMI 2025-2029	23
2.2 Visi Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) 2025-2029	24
2.3 Visi Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan BPSDMI 2025-2029	24
2.4 Visi Politeknik ATK Yogyakarta 2025-2029.....	24
2.5 Misi BPSDMI 2025-2029.....	25
2.6 Misi Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) 2025-2029	25
2.7 Misi Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan BPSDMI 2025-2029.....	25
2.8 Misi Politeknik ATK Yogyakarta 2025-2029	26
2.9 Tujuan BPSDMI 2025-2029	26
2.10 Tujuan Politeknik ATK Yogyakarta 2025-2029.....	27
2.11 Sasaran Program BPSDMI 2025-2029.....	27
2.12 Sasaran Program Politeknik ATK Yogyakarta 2025-2029	29
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	31
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Politeknik ATK Yogyakarta 2025-2029	31
3.1.1 Pengembangan Pendidikan Dual Sistem Bertaraf Global	31
3.1.2 Melaksanakan Penelitian Terapan yang Sesuai Dengan Kebutuhan Industri	34
3.1.3 Terselenggaranya Pengabdian kepada Masyarakat Industri dalam Pengembangan Ekosistem Industri Kecil dan Menengah (IKM)	34
3.1.4 Terwujudnya Pendirian Digital Capability Center (DCC) Sebagai Pusat Inovasi dan Pengembangan Industri 4.0	35
3.1.5 Terselenggaranya Pendampingan Tenant Wirausaha Industri	37
3.1.6 Mengembangkan Skema Kompetensi dan Uji Kompetensi LSP	37
3.1.7 Mengembangkan Kelas Industri	38
3.2 Kerangka Regulasi	38
3.3 Kerangka Kelembagaan	40
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	43
4.1 Target Kinerja.....	43
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	44
4.3 Kerangka Pendanaan	45
BAB V PENUTUP.....	47
Lampiran 1 Pohon Kinerja	48
Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Politeknik ATK Yogyakarta 2025-2029	50

Lampiran 3 Matriks Keterkaitan antara Aktivitas/Kegiatan, RO, Indikator Kinerja, dan Sasaran Strategis	52
Lampiran 4 Pedoman Kinerja.....	55
Lampiran 5 Matriks Kerangka Regulasi.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU No.3/2014 Perindustrian	8
Gambar 1. 2 Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam RIPIN	8
Gambar 1. 3 Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional	9
Gambar 1. 4 Tren Penanaman Modal Asing Indonesia, 2004-2023	10
Gambar 1. 5 Tren Total Factor Productivity Indonesia. 1970-2022	10
Gambar 1. 6 Tren Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan Indonesia, 2015-2024 ..	11
Gambar 1. 7 Tren Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Indonesia.	12
Gambar 1. 8 Tren Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja Industri Pengolahan Nonmigas Indonesia, 2021-2024	12
Gambar 1. 9 Proporsi Lulusan Pendidikan Tinggi yang Bekerja di Industri Prioritas.....	13
Gambar 1. 10 Proporsi Lulusan dengan Bidang Keilmuan STEM dari Seluruh Lulusan Pendidikan Tinggi yang Bekerja di Industri Prioritas.....	14
Gambar 1. 11 Proyeksi Kebutuhan Lulusan dengan Bidang Keilmuan STEM (Proporsi terhadap Seluruh Lulusan Pendidikan Tinggi) yang Bekerja di Industri Prioritas	14
Gambar 1. 12 Populasi Penduduk Indonesia di antara Negara ASEAN.....	16
Gambar 3. 1 Kurikulum dan Modul Pembelajaran 4.0	36
Gambar 3. 2 Struktur Kelembagaan BPSDMI	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Struktur Demografi Penduduk Indonesia	15
Tabel 2. 1 Peta Tujuan dan Sasaran Program BPSDMI	28
Tabel 2. 2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan TJ Politeknik ATK Yogyakarta	29
Tabel 2. 3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK 1 Politeknik ATK Yogyakarta	29
Tabel 2. 4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK 2 Politeknik ATK Yogyakarta	30
Tabel 2. 5 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK 3 Politeknik ATK Yogyakarta	30
Tabel 2. 6 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK 4 Politeknik ATK Yogyakarta	30
Tabel 3. 1 Kerangka Regulasi.....	39
Tabel 4. 1 Target Kinerja Politeknik ATK Yogyakarta 2025-2029.....	43
Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Politeknik ATK Yogyakarta 2025-2029	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Arah Pembangunan Industri Nasional

Sektor industri merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Sektor industri tidak saja memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, tetapi juga pada pembentukan daya saing nasional. Peran penting sektor industri tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (selanjutnya disebut UU No. 3/2014 Perindustrian) di mana industri diletakkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Sebagai pengampu sektor industri, Kementerian Perindustrian memiliki peran sebagai berikut (UU No. 3/2014):

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) merupakan salah satu unsur struktur utama Kementerian Perindustrian. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, BPSDMI bertugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri. Tugas tersebut diselenggarakan melalui lima fungsi BPSDMI (Permenperin No. 1/2025), yaitu:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan sumber daya manusia industri;
2. Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan sumber daya manusia industri;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Politeknik ATK Yogyakarta sebagai satuan kerja dibawah PPPVI dan BPSDMI, mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang teknologi kulit, produk kulit/ alas kaki, karet dan plastik sebagai salah satu komponen strategis dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam RENSTRA Kementerian Perindustrian Tahun 2025 – 2029. Tugas tersebut diselenggarakan melalui tiga fungsi, yaitu:

1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri Dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Nonmigas
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
3. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan/Pelatihan Vokasi Industri

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kemajuan industri nasional secara sistematis dan terencana agar mampu mewujudkan Indonesia yang maju sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045.



Gambar 1. 1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU No.3/2014 Perindustrian
Sumber: (UU No. 3/2014)

Arah dan kebijakan pembangunan industri nasional dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang ditetapkan melalui PP No. 14/2015. Sebagai peta jalan pembangunan industri jangka panjang, RIPIN 2015-2035 merupakan pedoman bersama bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di Indonesia.



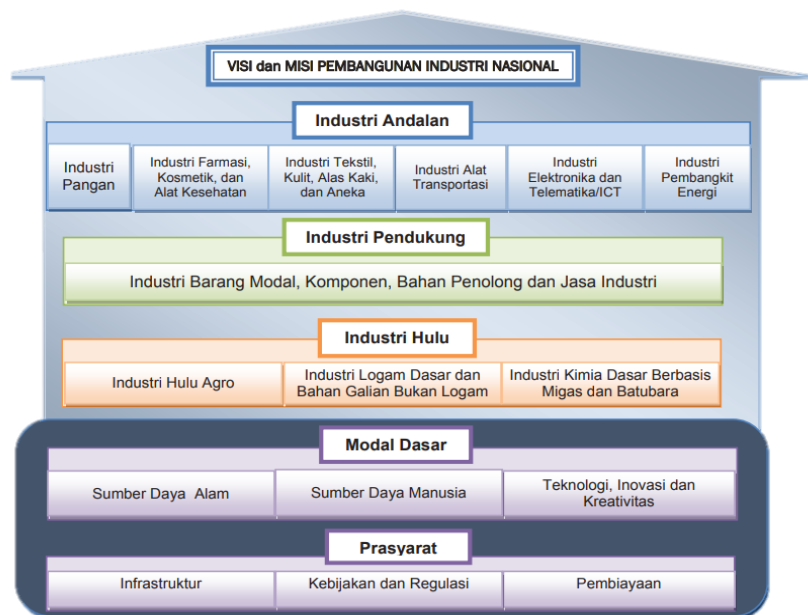
Gambar 1. 2 Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam RIPIN
Sumber: (PP No. 14/2015)

RIPIN Tahun 2015-2035 membagi capaian pembangunan industri ke dalam tiga tahap, yaitu:

- Tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, dan migas; diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan

andalan melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten, serta peningkatan penguasaan teknologi.

- Tahap II (2020-2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
- Tahap III (2025-2035) adalah Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi (lihat Gambar 3).

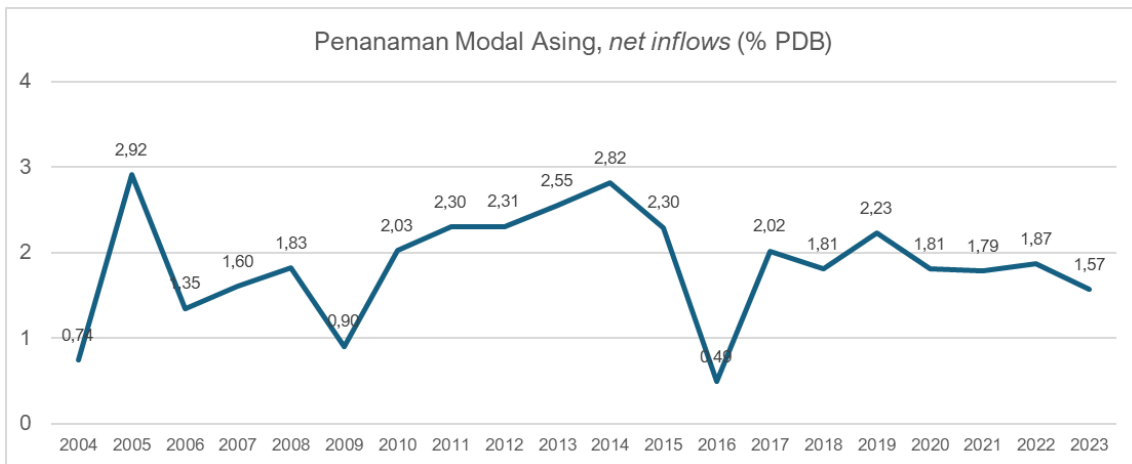


Gambar 1. 3 Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional
Sumber: (PP No. 14/2015)

Dalam rangka mendukung Visi Indonesia Emas 2045 yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pemerintah menargetkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) senilai 8% di tahun 2029¹. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia tidak dapat hanya bergantung pada pertumbuhan input seperti modal dan tenaga kerja. Pasalnya, bonus demografi Indonesia diproyeksikan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030². Di sisi lain, arus masuk bersih penanaman modal asing (PMA) mengalami stagnansi setidaknya sejak tahun 2017 di angka 1,5 – 2,3% dari PDB (lihat Gambar 4). Lebih jauh lagi, instabilitas geopolitik dan geoekonomi yang terjadi beberapa tahun terakhir berpotensi mengganggu aliran modal asing tersebut.

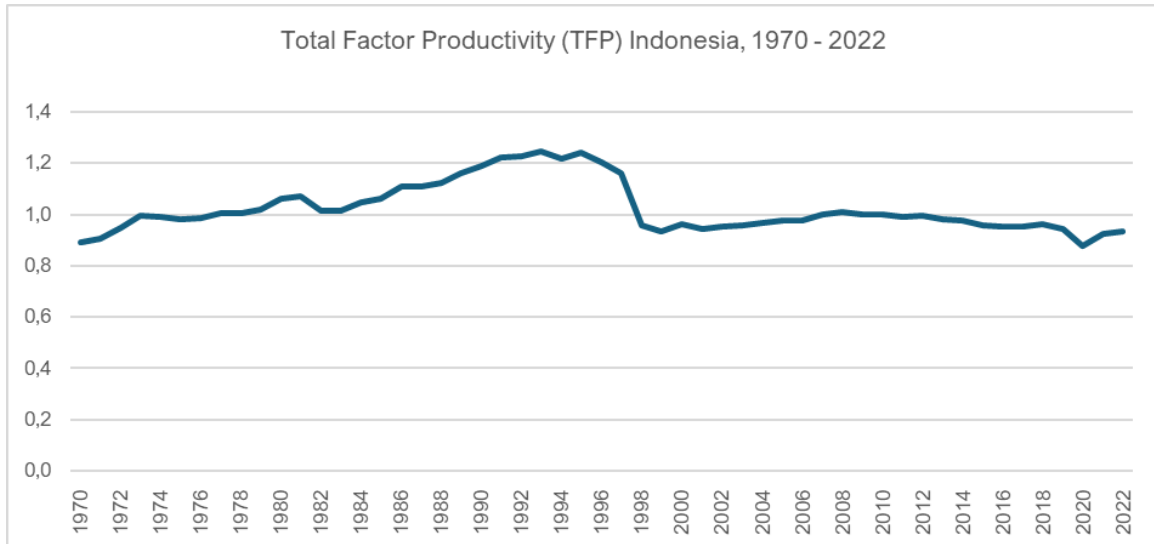
¹ (UU No. 59/2024)

² (Badan Pusat Statistik, 2022)



Gambar 1. 4 Tren Penanaman Modal Asing Indonesia, 2004-2023
 Sumber: diolah dari (World Bank, 2024)

Maka dari itu, peningkatan efisiensi dan produktivitas perekonomian perlu dilakukan untuk memastikan bahwa bonus demografi dan penanaman modal dapat digunakan secara efektif demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurut Bank Indonesia, kontribusi produktivitas atau *Total Factor Productivity* (TFP) Indonesia perlu ditingkatkan dari hanya 1,37% menjadi rata-rata 3,61% pada periode 2025-2029³. Sebagai referensi (lihat Gambar 5), TFP Indonesia stagnan di kisaran 0,9⁴ sejak 2011. Untuk meningkatkan kontribusi produktivitas, pemerintah melalui BPSDMI harus bekerja untuk meningkatkan proporsi tenaga kerja industri manufaktur yang memiliki nilai tambah lebih tinggi daripada sektor agrikultur dan jasa, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor tersebut.



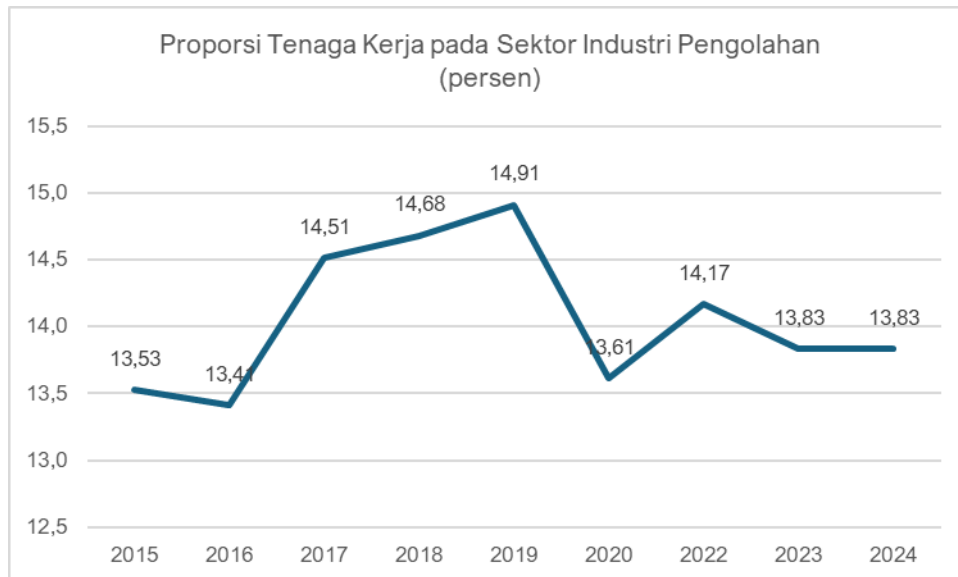
Gambar 1. 5 Tren *Total Factor Productivity* Indonesia. 1970-2022
 Sumber: diolah dari (*Asian Productivity Organization*, 2025a)

Data menunjukkan bahwa tantangan utama yang membayangi pembangunan industri dari sisi ketenagakerjaan adalah kuantitas serta kualitas tenaga kerja yang masih rendah pada industri

³ (Kontan, 2025). Perlu diperhatikan bahwa pada artikel ini TFP menggunakan satuan unit persen (%).

⁴ TFP merupakan nilai rasio agregat output terhadap agregat input dari produktivitas, biasanya nilai TFP dicantumkan **tanpa satuan unit**.

pengolahan. Dari sisi kuantitas, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan masih berada di angka 13,83%⁵ (lihat juga Gambar 6). Angka ini masih berada di bawah proporsi di tahun 2019 (14,91%)⁶, sehingga menunjukkan bahwa pemulihan sektor industri pengolahan pasca pandemi COVID-19 belum optimal.

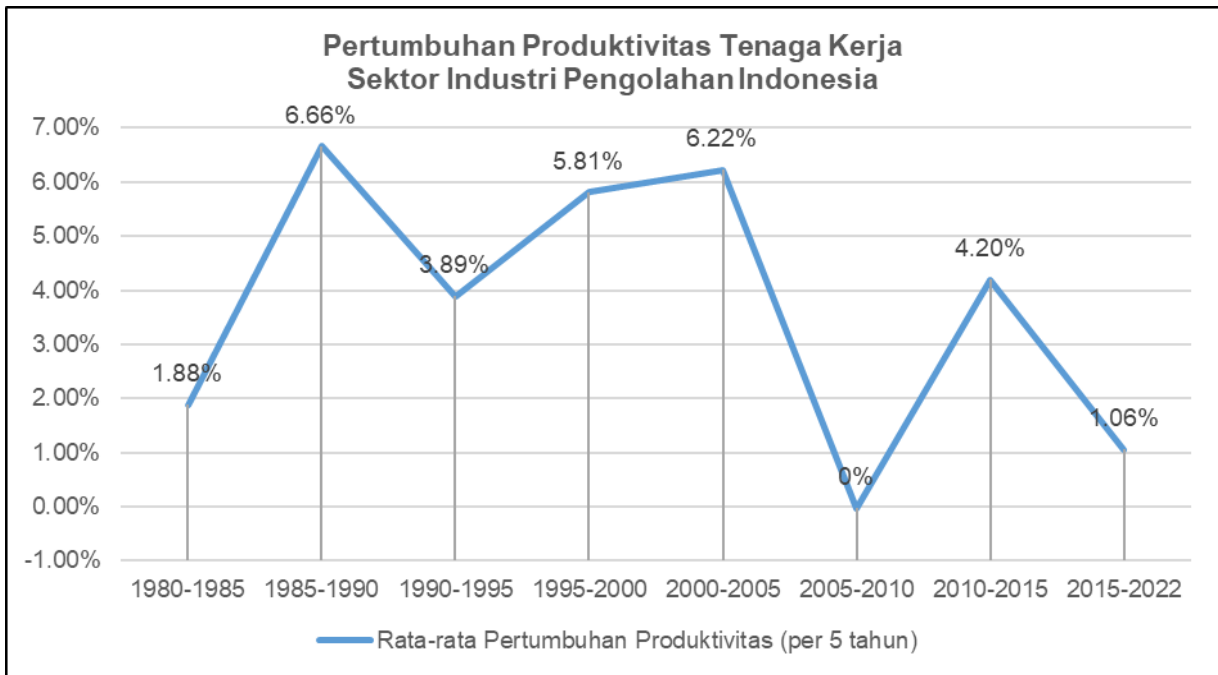


Gambar 1. 6 Tren Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan Indonesia, 2015-2024
Sumber: diolah dari (Badan Pusat Statistik, 2025a, 2025b, 2025c)

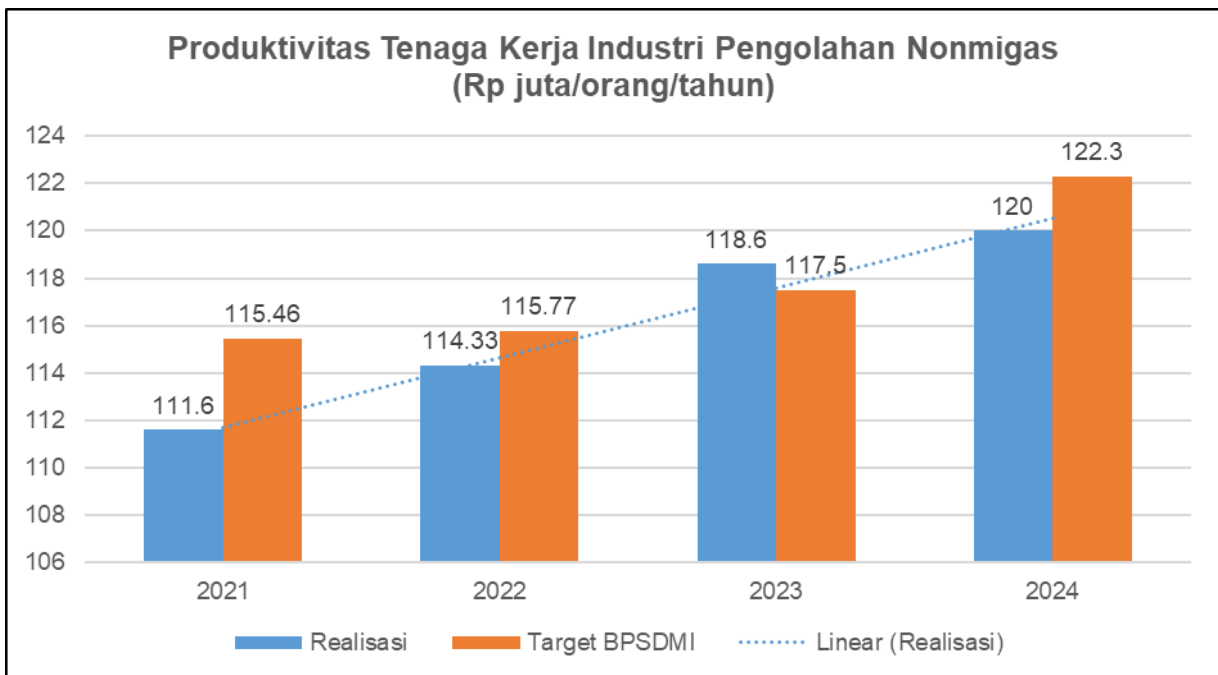
Di sisi kualitas, data dari *Asian Productivity Organization* (APO) menunjukkan bahwa pada periode 2015-2022, produktivitas tenaga kerja sektor pengolahan Indonesia hanya tumbuh sebesar 1,06% (lihat Gambar 7). Data BPSDMI juga menunjukkan bahwa sampai kuartal III tahun 2024, produktivitas tenaga kerja industri pengolahan nonmigas masih berada di angka 120 juta Rupiah/orang/tahun. Lebih jauh lagi, data ini menunjukkan bahwa pada periode 2021-2024, realisasi indikator kinerja produktivitas tenaga kerja pengolahan nonmigas hanya mencapai target capaian pada tahun 2023.

⁵ (Badan Pusat Statistik, 2025a)

⁶ (Badan Pusat Statistik, 2025b)



Gambar 1. 7 Tren Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Indonesia
 Sumber: (Asian Productivity Organization, 2025b)



Gambar 1. 8 Tren Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja Industri Pengolahan Nonmigas Indonesia, 2021-2024
 Sumber: LAKIP BPSDMI 2024

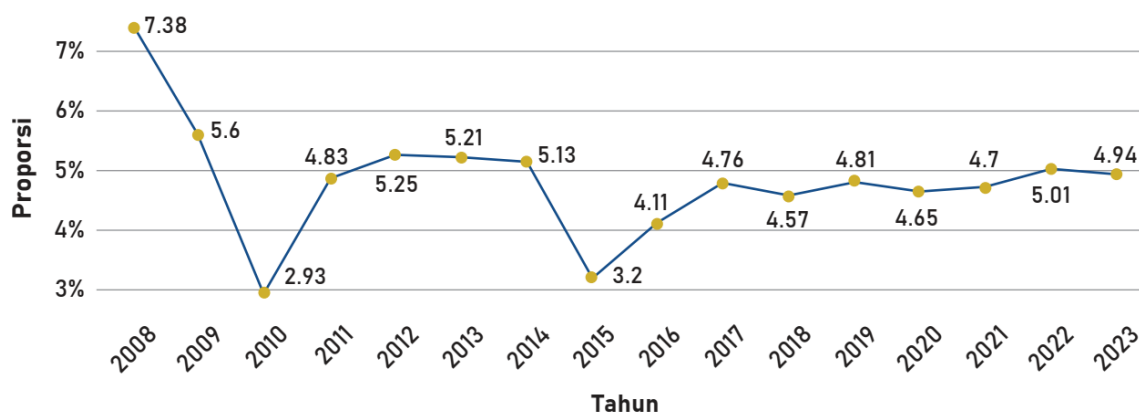
Berdasarkan proyeksi pertumbuhan sektor industri nonmigas (2019), setidaknya dibutuhkan pertumbuhan sektor industri sebesar 6,2% setiap tahunnya agar dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap PDB dengan jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sekitar 17,1 juta tenaga kerja sektor industri dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja industri sebesar 600 ribu pekerja setiap tahunnya. Sampai

akhir tahun 2024, Kemenperin memproyeksikan bahwa kebutuhan tenaga kerja industri riil mencapai 682 ribu setiap tahunnya.

Di sisi yang lain, sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045, Indonesia bercita-cita untuk mewujudkan pendapatan per kapita setara negara maju. Demi mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah menjadikan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya sebagai prioritas nasional yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Hilirisasi dan industrialisasi dapat meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri, sehingga ekspor Indonesia tidak lagi didominasi oleh sumber daya alam mentah. Sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia, Pemerintah kemudian menetapkan delapan proyek strategis, yaitu; hilirisasi nikel, hilirisasi tembaga, hilirisasi bauksit, hilirisasi sawit, hilirisasi rumput laut, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), industri kimia, serta industri farmasi dan kosmetik.⁷

1.1.2 Pembangunan SDM Industri

Menurut BPS, hingga Februari 2024, terdapat 149,4 juta penduduk yang tergolong angkatan kerja dari 214 juta penduduk berumur 15 tahun ke atas. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebanyak 142,2 juta memiliki pekerjaan, sedangkan 7,2 juta berstatus pengangguran. Sayangnya, bahkan pada mereka yang berstatus bekerja, hanya 12,7% merupakan lulusan diploma atau universitas, sedangkan 87,3% merupakan lulusan SMA/K atau lebih rendah. Di sisi lain, pada mereka yang berstatus pengangguran, 14,5% merupakan lulusan diploma atau universitas dan 85,5% merupakan lulusan SMA/K atau lebih rendah.⁸

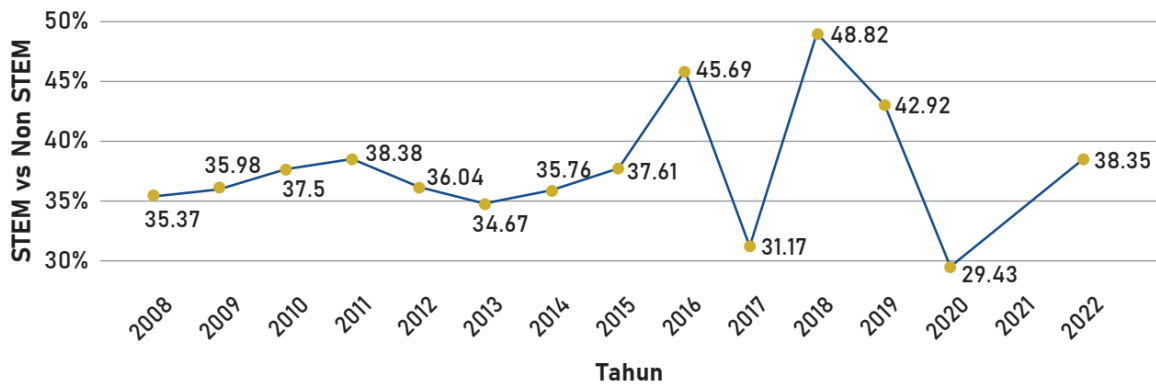


Gambar 1. 9 Proporsi Lulusan Pendidikan Tinggi yang Bekerja di Industri Prioritas

Sumber: (Direktorat Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas, 2025)

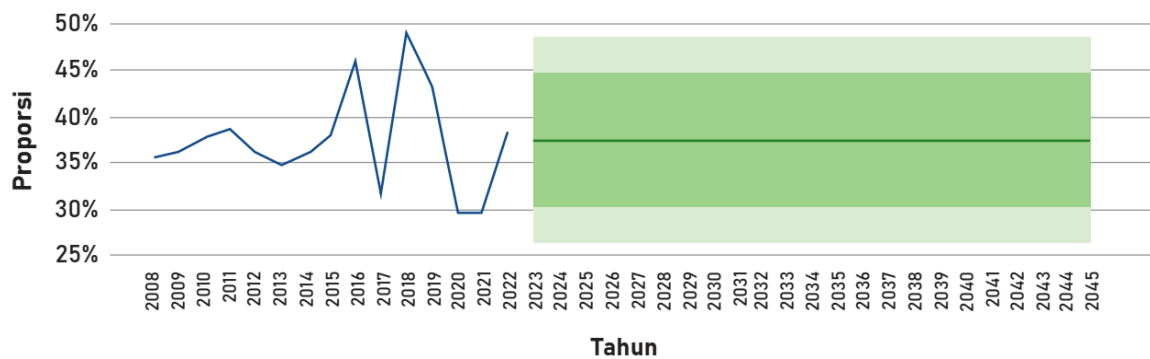
⁷ (Perpres No. 12/2025)

⁸ (Badan Pusat Statistik, 2024)



Gambar 1. 10 Proporsi Lulusan dengan Bidang Keilmuan STEM dari Seluruh Lulusan Pendidikan Tinggi yang Bekerja di Industri Prioritas

Sumber: (Direktorat Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas, 2025)



Gambar 1. 11 Proyeksi Kebutuhan Lulusan dengan Bidang Keilmuan STEM (Proporsi terhadap Seluruh Lulusan Pendidikan Tinggi) yang Bekerja di Industri Prioritas

Sumber: (Direktorat Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas, 2025)

Jika ditilik lebih lanjut, proporsi lulusan pendidikan tinggi yang bekerja di industri prioritas⁹ pada periode 2016 – 2023 berada pada kisaran 4,7% (lihat Gambar 9). Dari seluruh lulusan pendidikan tinggi, hanya 38,35% (2022) dengan bidang keilmuan STEM (lihat Gambar 10) dan diperkirakan akan bertahan di kisaran nilai 37% sampai dengan 2045 (lihat Gambar 11).

Melihat realitas yang terjadi dalam upaya pembangunan SDM sampai hari ini, Indonesia belum siap untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju. Khususnya, masih diperlukan berbagai intervensi untuk mewujudkan sasaran visi pertama (pendapatan per kapita setara negara maju) dan kedua (daya saing SDM meningkat). Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini belum mampu menyerap dan menciptakan tenaga kerja yang produktif. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan penurunan elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja. Asumsi 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 350 ribu sampai 400 ribu tenaga kerja tidak dapat tercapai. Asumsi tersebut hanya mampu menyerap 200 ribu tenaga kerja tiap tahunnya. HDI (*Human*

⁹ Industri prioritas yang dimaksud mencakup industri farmasi, komestik, dan alat kesehatan; pangan; pembangkit energi; elektronika dan telematika/ICT; hulu agro; kimia dasar berbasis migas dan batubara; tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka; alat transportasi; logam dasar dan bahan galian bukan logam; barang modal; serta komponen, bahan penolong, dan jasa industri.

Development Index) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia saat ini hanya 0,713 atau peringkat 112 dari 193 negara di dunia. Adapun nilai Indeks Modal Manusia Indonesia berada di angka 0,54 dan menempatkannya di peringkat 96 dari 173 negara di dunia, masih jauh dari target angka 0,73 di tahun 2045.

Tabel 1. 1 Struktur Demografi Penduduk Indonesia

Usia*	Jumlah (%)
0-15 tahun	24%
15-24 tahun	16%
25-34 tahun	16%
35-44 tahun	15%
45-54 tahun	13%

*usia produktif ditandai dengan huruf tebal dan warna latar berbeda
Sumber: BPS 2024, diolah oleh Kemenperin

Hambatan pengembangan SDM di Indonesia dilandasi oleh dua hal pokok yang tidak dapat dihindari, yaitu: pertama, liberalisasi dan eksklusivitas pendidikan yang menyebabkan sekolah mahal dan angka putus sekolah tinggi; kedua, sistem pendidikan yang tidak *link and match*, artinya pendidikan hari ini lebih menitikberatkan pada kuantitas dan kualitas, bukan pada keterampilan. Maka dari itu, peningkatan daya saing SDM telah dijadikan salah satu sasaran utama visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN 2025-2045. Selain itu, RPJPN 2025-2045 juga menyinggung pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual system* sebagai salah satu strategi meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam mewujudkan transformasi ekonomi.

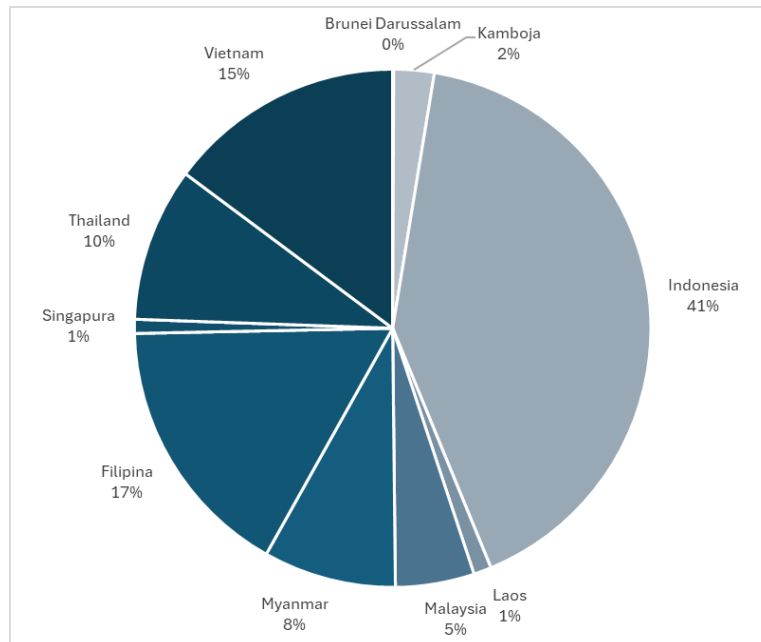
Oleh karena itu, untuk mengawali pembangunan SDM Indonesia diperlukan suatu solusi yang baru. Reformasi di bidang pendidikan semakin penting, terutama dengan mendorong pendidikan terjangkau, reformasi sistem pendidikan dengan konsep *link and match*, serta pengajaran budi pekerti. Tidak hanya itu, dibutuhkan pula pengelolaan iklim tenaga kerja, revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, pembangunan infrastruktur fisik dan nonfisik, pengembangan regulasi tenaga kerja dan perbaikan hubungan industrial, serta menjadikan pembangunan SDM sebagai prioritas program pembangunan nasional. Solusi-solusi tersebut diharapkan mampu mengantar Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 dengan SDM yang siap dan berdaya saing.

1.2 Potensi dan Tantangan

1.2.1 Potensi dan Tantangan Umum

Salah satu keunggulan Indonesia adalah bonus demografi yang besar. Berdasarkan proyeksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2015), bonus demografi Indonesia akan mencapai puncak pada tahun 2025. Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar di ASEAN (*the Association of Southeast Asian Nations*) yang mencakup lebih dari 41% penduduk ASEAN (lihat Gambar 1.12). Selain itu Indonesia juga merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia atau sebesar 3,5% populasi dunia. Salah satu kekuatan penting dalam komposisi demografi Indonesia ukuran angkatan kerja yang besar,

yaitu sebanyak 149 juta jiwa atau sebesar 53% dari total penduduk Indonesia. Apabila dikelola dengan baik, penduduk usia produktif dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan pengembangan inovasi untuk mendorong peningkatan daya saing. Sebaliknya, bila tidak dikelola dengan baik, bonus demografi berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran.



Gambar 1. 12 Populasi Penduduk Indonesia di antara Negara ASEAN
 Sumber: diolah oleh Kemenperin dari (ASEAN Secretariat, 2024)

Merujuk pada RIPIN 2015-2035, tenaga kerja industri akan bertambah rata-rata 600 ribu pekerja per tahun. Oleh karena itu, target pembangunan SDM industri untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri adalah rata-rata 3,2 persen per tahun dengan komposisi tenaga kerja manajerial sebesar 12% dan tenaga kerja teknis sebesar 88%. Untuk mencapai target tersebut, BPSDMI bertugas untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja industri. Namun demikian, keadaan di lapangan masih menunjukkan bahwa lembaga diklat dan lembaga sertifikasi yang ada saat ini belum memiliki kapasitas pelatihan dan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan industri. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ruang fiskal dan anggaran dalam mendanai berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi industri. Oleh karena itu, bentuk-bentuk pendanaan baru seperti kerja sama dengan mitra di sektor swasta dan negara donor serta pengembangan satker yang lebih mandiri secara finansial dibutuhkan untuk membantu BPSDMI memastikan bahwa kebutuhan SDM industri yang terus meningkat tersebut dapat dipenuhi.

Pendidikan vokasi sudah berkembang di Indonesia sejak lebih dari 150 tahun yang lalu dan mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun perannya dalam pembangunan kualitas tenaga kerja relatif kecil dibandingkan dengan pendidikan umum (akademik). Pasokan tenaga kerja terdidik sebagian besar merupakan lulusan pendidikan akademik atau pendidikan umum. Di antara angkatan kerja berpendidikan sekolah menengah atas, hanya 37,5% yang merupakan lulusan SMK. Di sisi lain, di antara tenaga kerja berpendidikan tinggi, hanya 18,7% merupakan lulusan program

diploma dan akademi.¹⁰ Komposisi pasokan tenaga kerja tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih berminat mengikuti pendidikan akademik daripada pendidikan vokasi. Untuk itu, pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, baik politeknik/akademi komunitas maupun SMK, perlu meningkatkan kualitasnya sehingga dapat bersaing dengan pendidikan akademik.

Selain potensi dan permasalahan yang berifat endogen, terdapat pula setidaknya 3 (tiga) isu terkait SDM industri yang perlu diperhatikan. *Pertama*, perkembangan teknologi selama lima tahun terakhir telah mengubah lanskap perindustrian dan ketenagakerjaan. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), khususnya, menjadi isu yang perlu dihadapi secara hati-hati. AI dan teknologi lainnya tentu berpotensi meningkatkan produktivitas perekonomian dan membuka lapangan kerja baru jika dapat dimanfaatkan secara tepat. Akan tetapi, perkembangan teknologi juga memiliki risiko inheren berupa hilangnya berbagai lapangan pekerjaan akibat otomatisasi. Pemerintah, melalui Kemenperin dan BPSDMI, perlu menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut, sehingga meskipun beberapa lapangan kerja akan hilang, lapangan kerja lain yang muncul akibat perkembangan teknologi dapat diisi oleh SDM yang kompeten dan adaptif. Program pendidikan dan pelatihan vokasi berupa *upskilling* dan *reskilling* akan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya dapat segera bertransisi ke lapangan kerja yang baru tercipta. Sampai saat ini, program pendidikan dan latihan yang disediakan oleh satker BPSDMI masih belum dapat memfasilitasi kebutuhan industri 4.0 secara optimal.

Kedua, isu yang perlu menjadi perhatian adalah ekonomi hijau, termasuk transisi energi, dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Indonesia sendiri memiliki target untuk mewujudkan emisi nol bersih (*Net Zero Emission/NZE*) pada tahun 2060¹¹. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia sudah mulai menjalankan berbagai program ekonomi hijau yang diproyeksikan akan menciptakan sekitar 15,3 juta lapangan pekerjaan sampai tahun 2045. Hingga saat ini, telah terdapat lima lapangan pekerjaan hijau yang sudah tersedia; energi, pertanian, manufaktur, konstruksi, dan jasa pariwisata. Maka dari itu, tantangan yang hadir dari isu ekonomi hijau adalah mengenai penyiapan SDM industri yang memiliki keahlian untuk mengisi lapangan-lapangan pekerjaan yang membutuhkan kompetensi tinggi tersebut. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah melalui Kemenperin dan BPSDMI perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan STEM baik di tingkat sekolah menengah atas maupun pendidikan tinggi. *Ketiga*, isu eksternal lain yang perlu diperhatikan adalah dinamika ekonomi global dan kaitannya dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% persen. Instabilitas geopolitik di Eropa dan Timur Tengah beberapa tahun terakhir telah menghasilkan permasalahan rantai pasokan, suplai energi, dan kepercayaan pasar keuangan global. Kompleksitas ini menjadi tantangan yang signifikan bagi upaya Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% per tahun. Oleh karena itu, pembangunan SDM

¹⁰ (Badan Pusat Statistik, 2025d)

¹¹ (Republic of Indonesia, 2022)

industri Indonesia menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan industri dalam negeri, agar paparan risiko Indonesia terhadap dinamika global dapat dimitigasi.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah juga telah mengambil beberapa inisiasi kebijakan strategis untuk mendukung pembangunan bidang perindustrian di Indonesia. Inisiatif pertama adalah upaya implementasi peta jalan *Making Indonesia 4.0* pada tujuh sektor industri prioritas, yaitu industri makanan dan minuman, kimia, tekstil dan busana, otomotif, elektronika, farmasi serta alat kesehatan. Selain itu, pemerintah juga melanjutkan upaya substitusi impor melalui penurunan impor pada sektor-sektor dengan persentase impor terbesar, simultan dengan upaya peningkatan utilisasi produksi. Target substitusi impor dapat dicapai melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui pemberlakuan kewajiban bagi Kementerian, Lembaga, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) mencapai 40% seperti diatur dalam PP No. 29/2018 Pasal 61. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan TKDN yang sebelumnya cenderung bersifat *inward-looking*, diarahkan agar berspektrum luas/*outward-looking* dengan perspektif P3DN sebagai fasilitator.

1.2.2 Potensi dan Tantangan Khusus

Selama periode 2020-2024, secara khusus BPSDMI menghadapi berbagai potensi dan tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan seri wawancara dan *focus group discussion* (FGD) yang telah dilaksanakan dengan unit dan satuan kerja BPSDMI, berikut ini potensi dan tantangan yang secara khusus ditemukan oleh unit kerja eselon II BPSDMI.

Pada unit kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI), ditemukan bahwa telah terjadi peningkatan animo pendaftar serta keterserapan lulusan SMK dan politeknik/akademi komunitas binaan. Di sisi lain, masih ditemukan tantangan berupa tumpang tindih regulasi dengan kementerian/lembaga lain, tingkat pendidikan SDM dosen yang belum optimal, kurang selarasnya satuan kerja pendidikan, dukungan pemerintah daerah kepada akademi komunitas yang masih minim, animo dan keterserapan di beberapa satuan kerja yang belum maksimal, anggaran yang tidak cukup untuk membiayai kebutuhan satuan kerja, serta indikator kinerja yang belum sesuai.

Pada unit kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) SDM Industri, ditemukan bahwa produk unit kerja tersebut, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), disusun berdasarkan kebutuhan riil industri dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan pendidikan dan pelatihan industri. Pusdiklat SDM Industri juga berkoordinasi dengan tujuh Balai Diklat Industri (BDI) yang menyelenggarakan pelatihan 3 *in* 1. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi adalah kerumitan dalam penyusunan SKKNI karena harus mengikuti mekanisme tata kerja dari kementerian lain, perubahan prioritas pemerintah, komitmen dari pemangku kepentingan dalam penyusunan standar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan SKKNI, kegiatan pendidikan dan latihan di BDI yang belum sesuai dengan perkembangan teknologi, serta ketersediaan data, SDM internal, dan anggaran.

Terakhir, pada unit kerja Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan (Pusbindiklat) SDM Aparatur, ditemukan bahwa unit kerja tersebut telah menyelenggarakan 50 pelatihan untuk lebih dari 1.600

Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang industri pada tahun 2024. Pusbindiklat juga menyelenggarakan diklat teknis berjenjang, beasiswa pendidikan S2 dan S3 untuk ASN Kemenperin, uji kompetensi jabatan fungsional, serta mengembangkan paket pembelajaran daring melalui Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (SIPPA). Di sisi lain, Pusbindiklat menemui tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan anggaran, kewajiban pengembangan kompetensi ASN sebanyak 20 jam pelajaran per tahun, indikator yang belum sesuai, serta kerumitan dalam mengelola jabatan fungsional.

Adapun dari segi manajemen dan pengelolaan unit kerja, tantangan yang dihadapi BPSDMI dapat dijelaskan ke dalam tiga aspek, yaitu: a) pengelolaan anggaran; b) manajemen SDM; dan tantangan koordinasi.

Tantangan yang muncul akibat keterbatasan, prioritas, kemudian efisiensi anggaran membuat BPSDMI perlu lebih kreatif agar program dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat diimplementasikan secara optimal. Pertama, BPSDMI bertugas mengelola sebelas politeknik, dua akademi komunitas, sembilan SMK, dan tujuh BDI, serta menjalankan program seperti Diklat *3-in-1* yang menuntut biaya besar untuk pelatihan, sertifikasi, dan fasilitasi penempatan kerja. Keterbatasan anggaran kerap kali menjadi hambatan dalam perluasan skala dan kualitas program, terutama ketika menjalankan peningkatan kapasitas diklat berbasis industri 4.0. Selain itu, keterbatasan anggaran membatasi kemampuan BPSDMI untuk memperluas cakupan program, terutama di daerah terpencil dan/atau luar Jawa. Kedua, APBN memang memprioritaskan pembangunan SDM, namun alokasi anggaran terbesar diarahkan pada Pendidikan level dasar dan menengah. Sementara, pendidikan vokasi industri masih harus bersaing dengan kebutuhan lain seperti anggaran kesehatan, infrastruktur, maupun subsidi. *Ketiga*, efisiensi belanja anggaran serta pemangkasan anggaran operasional untuk perjalanan dinas dan kegiatan non-prioritas. Bagi BPSDMI, hal ini dapat menghambat upaya peningkatan kolaborasi dan transfer teknologi dengan negara-negara lain. Partisipasi dalam kejuaraan internasional tertentu seperti *WorldSkills Championship*¹² tetap dimungkinkan, namun skala dan frekuensi kegiatan serupa lainnya dibatasi oleh ketersediaan anggaran.

Dalam mengelola dan menjalankan program dan kegiatan, BPSDMI juga mengalami tantangan yang berkaitan dengan kapasitas SDM, seperti kuantitas dan distribusi SDM yang tidak merata; kualitas dan kompetensi SDM yang kurang mencukupi; kapasitas manajerial dan administratif yang perlu ditingkatkan; kurangnya motivasi dan retensi SDM; serta perubahan eksternal yang menuntut SDM BPSDMI untuk selalu beradaptasi. Tantangan-tantangan tersebut menimbulkan variasi kinerja dalam implementasi program dan kegiatan BPSDMI. Pertama, distribusi dan jumlah SDM yang tidak merata dengan konteks negara dengan geografis seperti Indonesia akan menimbulkan akses pendidikan vokasi dan pelatihan yang tidak merata pula. Kedua, perkembangan teknologi membutuhkan kualitas dan kompetensi SDM BPSDMI yang terus berkembang dan mampu mengikuti perkembangan

¹² WorldSkills Championship merupakan kejuaraan yang diadakan secara dwitahunan yang mempertandingkan keahlian teknis seperti *3D Digital Game Art*, *additive manufacturing*, *aircraft maintenance*, teknologi otomotif, dan berbagai keahlian lainnya.

teknologi. Ketiga, khususnya di sekretariat, BPSDMI perlu memastikan agar perencanaan, koordinasi, dan evaluasi program berjalan dengan lancar. Untuk ini BPSDMI membutuhkan SDM dengan kapasitas manajemen proyek, analisis data, komunikasi lintas-unit, implementasi program, serta kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak baik di level nasional maupun internasional. Keempat, motivasi dan retensi ASN di BPSDMI juga perlu dijaga melalui keseimbangan remunerasi dan beban kerja. Beban kerja yang relatif tinggi berpotensi menimbulkan kelelahan (*burnout*) di kalangan staf BPSDMI. Kelima, periode 2020-2024 ditandai dengan pandemi COVID-19 dan akselerasi digitalisasi. SDM BPSDMI dituntut untuk bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi eksternal untuk dapat tetap mengimplementasikan program pendidikan dan pelatihan secara daring.

Program dan kegiatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan membutuhkan BPSDMI untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak. Seiring dengan semakin banyaknya pemangku kepentingan, BPSDMI menghadapi semakin beragam tantangan karena setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi oleh BPSDMI dalam berkoordinasi dengan lain seperti: tumpang tindih wewenang; perbedaan prioritas dan kebijakan; serta permasalahan birokrasi dan komunikasi. Tumpang tindih wewenang terjadi antara BPSDMI dengan K/L/D lain dalam beberapa persoalan, misalnya: kebijakan pendidikan vokasi dengan Kementerian Dikbudristek¹³, riset dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)¹⁴, dan pendirian satuan kerja dengan pemerintah daerah. Perbedaan prioritas dan kebijakan ditemukan misalnya dalam persoalan penempatan kerja yang beririsan dengan prioritas dan kebijakan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Terakhir, birokrasi yang lambat muncul karena adanya silo antar-K/L/D dan persoalan komunikasi yang kurang lancar karena terlalu banyak pihak yang berkepentingan.

Menghadapi potensi dan permasalahan seperti disebutkan di atas, Kementerian Perindustrian melalui BPSDMI perlu secara strategis menajamkan perencanaan pembangunan SDM industri dalam Rencana Strategis BPSDMI Tahun 2025-2029 untuk memastikan bahwa agenda pembangunan SDM Industri di Indonesia dapat berjalan dengan efektif. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan-kebijakan strategis di lingkungan BPSDMI akan berdampak pada tercapainya pemanfaatan potensi dan peluang yang ada sekaligus mengantisipasi setiap kendala dan hambatan yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bidang perindustrian di Indonesia. Di sisi yang lain, implementasi kebijakan strategis yang tidak berjalan secara efektif akan berdampak pada terjadinya stagnasi dan bahkan kemunduran performa bidang perindustrian di Indonesia.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan amanah dari UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BPSDMI telah menyusun Rencana

¹³ Pada periode 2025-2029, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dikbudristek) dipecah menjadi tiga kementerian (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen); Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek); dan Kementerian Kebudayaan). Oleh karena itu, pada periode 2025-2029, BPSDMI perlu berkoordinasi soal kebijakan pendidikan vokasi dengan Kementerian Dikdasmen (SMK) dan Kementerian Diktisaintek (politeknik dan akademi komunitas).

¹⁴ Pada periode 2025-2029, ada kemungkinan BPSDMI juga perlu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Diktisaintek untuk persoalan riset di perguruan tinggi.

Strategis BPSDMI Tahun 2025-2029 sesuai Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029. BPSDMI sebagai unit Eselon I di bawah Kemenperin mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPSDMI dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029. Renstra BPSDMI Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 dan disusun dengan pedoman Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.10/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

1.2.3 Kinerja Industri Kulit, Produk Kulit/Alas Kaki, Karet, dan Plastik Tahun 2020-2024

Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan kinerja industri kulit, produk kulit/alas kaki, karet, dan plastik karena merupakan kelompok industri pengolahan yang dikategorikan sebagai sektor prioritas dalam pengembangannya. Kelompok industri ini juga berperan strategis sebagai penghasil devisa negara.¹⁵ Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa industri penyamakan kulit pada akhir 2020 akan tumbuh maksimal 1 persen dari realisasi 2019.

Kontraksi pertumbuhan ketiga terbesar pada triwulan I - triwulan III 2020 dialami oleh kelompok industri kulit, produk kulit/alas kaki, karet, dan plastik, yang tercatat sebesar 9,66% (c to c) dari pertumbuhan yang juga sudah negatif sebesar 0,73% (c to c) pada triwulan I - triwulan III 2019. Namun, terjadinya kontraksi pertumbuhan ini tidak sejalan dengan kinerja ekspor industri ini. Pada periode Januari-September 2020 industri kulit, produk kulit/alas kaki, karet, dan plastik masih mencatatkan kenaikan volume ekspor sebesar 2,4% (c to c), bahkan dengan nilai ekspor yang tumbuh lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 5,2% (c to c). Hal ini disebabkan karena pada semester I 2020 industri ini mengalami kenaikan volume ekspor sebesar 4,85% (c to c) dengan nilai ekspor naik sebesar 9,79% (c to c). Kenaikan ekspor industri Kulit, produk kulit/alas kaki, karet, dan plastik pada periode Januari- September 2020 terjadi hanya pada ekspor sepatu olahraga, karena komoditi lainnya sudah mengalami penurunan yang cukup berarti. Pada triwulan I - triwulan III 2020, volume ekspor sepatu olahraga naik sebesar 34,09% (c to c), dengan nilai ekspor yang naik sebesar 34,77% (c to c). Sedangkan volume ekspor sepatu teknik lapangan/keperluan Industri, dan juga volume ekspor alas kaki untuk keperluan sehari-hari mengalami penurunan masing-masing sebesar 43,78% (c to c) dan 11,37% (c to c).

Secara garis besar, kinerja industri kulit, produk kulit/alas kaki, karet, dan plastik sepanjang periode 2020–2024 mencerminkan pola pemulihan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, sektor-sektor ini mengalami kontraksi hebat akibat pandemi COVID-19 yang memutus rantai pasok dan menurunkan daya beli domestik. Namun, memasuki tahun 2021 hingga 2022, industri alas kaki dan produk kulit sempat menjadi primadona ekspor nasional karena adanya pengalihan order global ke Indonesia.

Sayangnya, tren positif tersebut melambat pada periode 2023–2024 akibat gejolak geopolitik global dan inflasi di negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, yang menyebabkan

¹⁵ <https://www.kemenperin.go.id/artikel/16408/Kemenperin-Pacu-Kinerja-Industri-Kulit,-Alas-Kaki-dan-Aneka>

penurunan pesanan secara signifikan. Di sisi lain, industri karet dan plastik menghadapi tantangan struktural berupa fluktuasi harga komoditas mentah serta tekanan regulasi lingkungan terkait penggunaan plastik sekali pakai. Meski demikian, sektor ini tetap bertahan sebagai penopang utama industri barang konsumsi dan otomotif, dengan fokus mulai bergeser ke arah hilirisasi dan adopsi teknologi ramah lingkungan guna menjaga daya saing di pasar internasional.

Di tengah tekanan eksternal tersebut, dinamika investasi pada sektor alas kaki dan plastik justru menunjukkan pergeseran geografis yang menarik. Selama periode 2021 hingga 2024, terjadi tren relokasi besar-besaran pusat produksi dari wilayah dengan upah tinggi seperti Jawa Barat dan Banten menuju Jawa Tengah. Fenomena ini didorong oleh upaya perusahaan untuk menjaga efisiensi biaya operasional agar tetap kompetitif di pasar global yang semakin sensitif terhadap harga. Meskipun relokasi ini berhasil mempertahankan angka ekspor secara makro, tantangan besar muncul pada penyerapan tenaga kerja di lokasi lama yang mengalami gelombang efisiensi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penurunan pesanan dari merek-merek global.

Selain faktor biaya, sektor plastik dan karet juga mulai dipaksa untuk beradaptasi dengan standar keberlanjutan global yang semakin ketat. Implementasi konsep ekonomi sirkular (*circular economy*) melalui teknologi daur ulang plastik menjadi agenda prioritas bagi pelaku industri untuk menghindari hambatan dagang nontarif, terutama di pasar Eropa. Integrasi antara industri hulu yang menyediakan bahan baku polimer dengan industri hilir yang memproduksi kemasan ramah lingkungan mulai diperkuat. Hal ini dilakukan guna mengurangi ketergantungan pada bijih plastik impor yang harganya sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar dolar AS dan harga minyak mentah dunia.

Terakhir, strategi hilirisasi pada industri karet menjadi kunci krusial dalam upaya meningkatkan nilai tambah nasional di sisa tahun 2024. Pemerintah terus mendorong optimalisasi konsumsi karet domestik, salah satunya melalui pemanfaatan karet untuk campuran aspal jalan dan peningkatan produksi komponen otomotif lokal. Upaya ini diharapkan dapat memitigasi dampak rendahnya harga karet alam di pasar internasional yang seringkali merugikan petani dan produsen di hulu. Dengan memperkuat sinergi antara riset teknologi material dan kebutuhan manufaktur, industri-industri ini diharapkan mampu bertransformasi dari sekadar basis produksi berbiaya rendah menjadi pusat manufaktur berbasis teknologi dan material maju.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM

Visi adalah suatu rangkaian kata yang membuat impian, cita-cita, nilai, masa depan suatu organisasi. Visi juga merupakan sebuah tujuan dari sebuah institusi yang tercipta dari hasil pemikiran para pendiri terkait gambaran masa depan institusi. Dengan adanya visi memberikan fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menjadi inspirasi dan motivasi bagi para anggota institusi agar memberikan kontribusi yang maksimal. Visi sebagai gambaran masa depan tersebut sangat perlu penjelasan terkait bagaimana langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan misi untuk menggambarkan rencana atau cara yang ditentukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Sedangkan tujuan adalah penjabaran visi dan misi, serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu lembaga atau institusi.

Berikut adalah visi, misi, tujuan dan sasaran program Politeknik ATK Yogyakarta yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan Kementerian Perindustrian dan BPSDMI. Visi, misi, dan tujuan Politeknik ATK Yogyakarta tercantum pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik ATK Yogyakarta pada Pasal 9, 10, dan 11.

2.1 Visi BPSDMI 2025-2029

Visi Kementerian Perindustrian ditetapkan selaras visi pembangunan industri nasional “Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh bercirikan (1) struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan, (2) industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global, dan (3) industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi berikut :

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Pada periode 2025-2029, Kementerian Perindustrian mencanangkan tujuan “Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”.

Selaras dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Perindustrian, penyusunan visi dan misi BPSDMI juga mempertimbangkan capaian kinerja, kondisi internal dan eksternal (potensi dan permasalahan), arah organisasi ke depan, serta aspirasi dari para pemangku kepentingan terkait. BPSDMI memiliki

kontribusi penting dalam mewujudkan visi Negara Industri Tangguh sesuai Rencana Induk pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang menargetkan Indonesia menjadi negara industri dengan struktur kuat, berdaya saing global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka visi BPSDMI¹⁶ ditetapkan sebagai berikut:

“Meningkatkan daya saing global SDM industri melalui transformasi digital dan hilirisasi untuk mendukung Indonesia sebagai negara industri tangguh dan berkelanjutan.”

2.2 Visi Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) 2025-2029

Visi PPPVI disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan visi dan misi BPSDMI serta memberikan gambaran umum kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra di tahun 2024. Selain itu, penyusunan visi dan misi PPPVI juga mempertimbangkan capaian kinerja, kondisi internal dan eksternal (potensi dan permasalahan), arah organisasi ke depan, serta aspirasi dari *stakeholders* terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Visi PPPVI ditetapkan sebagai berikut:

“Menjadi Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Bertaraf Global untuk Mendukung Pembangunan Industri Nasional yang Berdaya Saing”

2.3 Visi Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan BPSDMI 2025-2029

Untuk mewujudkan visi *Corporate University* BPSDMI Kementerian Perindustrian menjadikan Vokasi Industri Bertaraf Global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri Tangguh, maka pengembangan kelembagaan Politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan BPSDMI ditetapkan visi dan misi yang diberlakukan sama di seluruh politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagai berikut.

“Menjadi penyelenggara pendidikan vokasi industri yang *excellence* dan berdaya saing global.”

2.4 Visi Politeknik ATK Yogyakarta 2025-2029

Mengacu pada visi BPSDMI di atas maka visi Politeknik ATK Yogyakarta yang tercantum pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik ATK Yogyakarta Pasal 9 adalah sebagai berikut:

“Menjadi penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi Industri yang unggul (*excellence*) dan berdaya saing global di bidang industri kulit, produk kulit/alas kaki, karet, dan plastik pada tahun 2030”

¹⁶ Rumusan visi ini diambil dari hasil wawancara tertulis (pertanyaan 4c.) dengan Kepala BPSDMI, Drs. Masrokhan, MPA, CGCAE yang dikirimkan pada 10 April 2025.

2.5 Misi BPSDMI 2025-2029

Dalam upaya agar BPSDMI tetap relevan dengan visi yang termaktub pada visi RIPIN 2015-2035, yaitu menjadi negara industri tangguh serta adaptif, maka BPSDMI merumuskan enam misi¹⁷ sebagai berikut:

1. Mengembangkan SDM industri yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi digital;
2. Mengembangkan SDM industri yang kompeten dalam teknologi hijau untuk mendukung transisi ekonomi berkelanjutan;
3. Memperluas dan meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan pelatihan vokasi industri dalam upaya memanfaatkan bonus demografi dan menghadapi tantangan geografis Indonesia;
4. Mengembangkan SDM industri yang bertaraf global yang mampu mendukung industri berorientasi ekspor;
5. Mengembangkan SDM industri yang untuk industri kecil dan menengah, industri baru, dan industri halal;
6. Mengembangkan SDM industri yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi disrupsi global seperti pandemi, perubahan iklim, dan konflik global.

2.6 Misi Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) 2025-2029

Untuk mewujudkan visi PPPVI di atas, dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan PPPVI sebagai berikut:

1. Mengembangkan Pendidikan Vokasi Industri *Dual System* bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi nasional;
2. Mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri pada lembaga pendidikan dan pelatihan industri;
3. Membangun wadah (*HUB Center*) sinergi, kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri.

2.7 Misi Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan BPSDMI 2025-2029

Seperti halnya pada visi, dalam rangka mewujudkan visi *Coporate University* BPSDMI juga memberikan misi yang berlaku sama bagi seluruh Politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian, yakni:

1. Menyelenggarakan pendidikan *dual system* dengan *STEM learning model* berstandar global;
2. Melaksanakan Penelitian Terapan *problem solving* sektor industri prioritas;
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pengembangan industri;
4. Mengembangkan kompetensi industri 4.0 melalui pembangunan satelit PIDI 4.0;
5. Membangun dan mengembangkan kelembagaan Inkubator bisnis industri yang terintegrasi dengan *stakeholder* terkait;
6. Mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi LSP; dan
7. Mengembangkan kelas industri.

¹⁷ Rumusan misi ini merupakan sintesis dari jawaban wawancara tertulis (pertanyaan 4b.) dengan Kepala BPSDMI, Drs. Masrokan, MPA, CGCAE yang dikirimkan pada 10 April 2025.

2.8 Misi Politeknik ATK Yogyakarta 2025-2029

Mengacu pada misi BPSDMI di atas, misi Politeknik ATK Yogyakarta yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik ATK Yogyakarta Pasal 10 adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi industri sistem ganda dengan pembelajaran *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM) berstandar global;
2. Melaksanakan penelitian terapan untuk pemecahan permasalahan di sektor industri prioritas;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ekosistem Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM);
4. Mengembangkan kompetensi transformasi digital industri 4.0 melalui pembangunan *Digital Capability Centre* (DCC) sebagai satelit Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0);
5. Membangun dan mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait;
6. Mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi; dan
7. Mengembangkan kelas industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri (*tailor made*).

2.9 Tujuan BPSDMI 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan SDM industri seperti disebutkan di atas, BPSDMI menetapkan tujuan pembangunan SDM industri¹⁸ 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

“Meningkatnya kuantitas, dan daya saing global SDM industri untuk mendukung transformasi digital, hilirisasi, dan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia sebagai negara industri tangguh dan mandiri.”

Perumusan tujuan di atas disusun atas beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- Penyelarasan tujuan BPSDMI dengan kebijakan pemerintah pusat yang dicanangkan melalui RPJPN 2025-2045 (meningkatkan SDM unggul dan mendorong ekonomi maju), visi misi Presiden, Asta Cita (meningkatkan SDM berdaya saing, mendorong hilirisasi, digitalisasi, dan memastikan keberlanjutan), serta RPJMN 2025-2029 (mendorong transformasi ekonomi).
- Respons BPSDMI terhadap perkembangan lanskap perindustrian di Indonesia, seperti menjawab tren teknologi (Industri 4.0), ekonomi (hilirisasi, globalisasi), serta demografi (bonus demografi hingga 2035) yang krusial dalam lima tahun terakhir.
- Penajaman dari tujuan pada renstra periode sebelumnya, sehingga tujuan lima tahun ke depan menjadi lebih spesifik (baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun daya saing), lebih inklusif (memastikan keberlanjutan dan pemerataan akses), dan lebih ambisius (berorientasi global dan mendorong kemandirian), sambil membangun capaian seperti pelatihan massal dan transformasi digital.

Lebih fokus pada dampak makro dengan cara mengarahkan SDM industri untuk berkontribusi lebih besar terhadap PDB dan ketahanan nasional, yang masih menjadi tantangan berdasarkan data 2024 (kontribusi industri hanya mencapai 20-25%).

¹⁸ Rumusan tujuan ini diambil dari rumusan tujuan seperti yang termaktub pada jawaban wawancara tertulis (pertanyaan 4c.) dengan Kepala BPSDMI, Drs. Masrokan, MPA, CGCAE yang dikirimkan pada 10 April 2025.

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui implementasi dan pengukuran indikator kinerja sasaran strategis.

2.10 Tujuan Politeknik ATK Yogyakarta 2025-2029

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Politeknik ATK Yogyakarta, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik ATK Yogyakarta Pasal 10 tujuan Politeknik ATK Yogyakarta dibawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian RI adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan diploma tiga yang kompeten sesuai kebutuhan industri dengan menerapkan pembelajaran *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM) berstandar global dan Pendidikan sistem ganda;
2. Menghasilkan penelitian terapan untuk pemecahan permasalahan di sektor industri kulit, produk kulit/alas kaki, karet, dan plastik;
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ekosistem Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM);
4. Terwujudnya layanan transformasi digital industri 4.0 melalui pembangunan *Digital Capability Centre* (DCC) sebagai satelit Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0);
5. Menghasilkan wirausaha industri melalui inkubator bisnis industri yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait;
6. Meningkatnya skema kompetensi dan uji kompetensi di Politeknik ATK Yogyakarta; dan
7. Terwujudnya kelas industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri (*tailor made*).

2.11 Sasaran Program BPSDMI 2025-2029

Sasaran program pembangunan SDM Industri BPSDMI merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BPSDMI sebagai suatu dampak/*outcome* dari rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSDMI. Pengembangan sasaran program BPSDMI dilakukan dengan memperhatikan pernyataan tujuan di atas dan keselarasan dengan sasaran strategis Kementerian Perindustrian periode 2025-2029.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian 2025-2029

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian
T	Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional
SS 1	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional
SS 2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif
SS 3	Meningkatnya Persebaran Industri
SS 4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi
SS 5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan
SS 6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas
SS 7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Kementerian Perindustrian

Sumber: Renstra Kemenperin TA 2025-2029

Mengacu pada sasaran strategis Kementerian Perindustrian 2025-2029 tersebut, dilakukan pemetaan kesesuaian sasaran strategis Kemenperin dan sasaran program BPSDMI.

Tabel 2. 2 Peta Tujuan dan Sasaran Program BPSDMI

Acuan SS Kemenperin	Sasaran Program dan Indikator BPSDMI	
T	Tujuan	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional 1. Persentase SDM industri yang kompeten
SS 1	SP 1	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Penumbuhan Sektor Industri 1. Persentase lulusan peserta didik dan diklat yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri 2. Persentase lulusan peserta pelatihan yang mempunyai kompetensi bidang industri 3. Wirausaha baru hasil inkubator bisnis industri yang tumbuh
SS 2	SP 2	Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0 1. Persentase SDM industri 4.0 yang meningkat kompetensinya 2. Industri yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 3. Nilai asesmen <i>Technical and Vocational Education and Training (TVET)</i> 4.0
SS 3	SP 3	Terwujudnya ASN Bidang Industri yang Profesional dan Berkepribadian 1. Persentase ASN bidang industri lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik 2. Tingkat kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional bidang industri
SS 4	SP 4	Meningkatnya Infrastruktur Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri 1. Persentase rancangan SKKNI bidang industri yang mencapai konsensus 2. Persentase penyusunan standar pelatihan berbasis kompetensi yang ditetapkan 3. Persentase fasilitasi pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 4. Persentase peserta diklat asesor kompetensi yang kompeten 5. Persentase tenaga kerja industri kompeten melalui fasilitasi sertifikasi kompetensi 6. Nilai rata-rata akreditasi program studi 7. Tingkat animo pendaftar pada unit pendidikan 8. Penelitian sektor industri prioritas yang terpublikasi

Acuan SS Kemenperin	Sasaran Program dan Indikator BPSDMI	
SS 5	SP 5	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima di BPSDMI 1. Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pada BPSDMI 2. Nilai SAKIP BPSDMI 3. Penilaian dan analisis laporan keuangan BPSDMI 4. Indeks profesional ASN pada BPSDMI 5. Indeks kinerja pelaksanaan anggaran pada BPSDMI 6. Nilai hasil pengawasan kearsipan pada BPSDMI 7. Tingkat penerapan SPBE dan kesiapan statistik sektoral pada BPSDMI 8. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh BPSDMI

Sumber: Perkin BPSDMI 2025

2.12 Sasaran Program Politeknik ATK Yogyakarta 2025-2029

Tujuan organisasi kemudian dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahunnya hingga secara keseluruhan tujuan tercapai pada tahun 2029. Selain itu, sasaran juga digunakan untuk mempermudah kegiatan monitoring dan evaluasi dari keberhasilan dan implementasi Renstra 2025-2029.

Mengacu pada sasaran program BPSDMI 2025-2029 tersebut, dilakukan pemetaan kesesuaian sasaran program BPSDMI dan sasaran kegiatan Politeknik ATK Yogyakarta. Untuk meningkatkan peran SDM industri dalam perekonomian nasional melalui unit pendidikan tinggi vokasi ditetapkan sasaran kegiatan beserta indikator kinerja sasaran kegiatan pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan TJ Politeknik ATK Yogyakarta

Kode	Tujuan (TJ) / Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Tujuan (IKT) / Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
TJ	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional Melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi	1. Persentase SDM Industri yang kompeten *

Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri dalam mendukung penumbuhan sektor industri melalui unit pendidikan tinggi vokasi ditetapkan sasaran kegiatan beserta indikator kinerja sasaran kegiatan pada tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK 1 Politeknik ATK Yogyakarta

Kode	Tujuan (TJ) / Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Tujuan (IKT) / Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
SK 1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi	1. Persentase lulusan peserta didik yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri * 2. Wirausaha baru hasil inkubator bisnis industri yang tumbuh

Untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dan kompetensi SDM menuju industri 4.0 ditetapkan sasaran kegiatan beserta indikator kinerja sasaran kegiatan pada tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK 2 Politeknik ATK Yogyakarta

Kode	Tujuan (TJ) / Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Tujuan (IKT) / Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
SK 2	Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0	1. Nilai asesmen <i>Technical and Vocational Education and Training</i> (TVET) 4.0

Untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan melalui unit pendidikan tinggi vokasi ditetapkan sasaran kegiatan beserta indikator kinerja sasaran kegiatan pada tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK 3 Politeknik ATK Yogyakarta

Kode	Tujuan (TJ) / Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Tujuan (IKT) / Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
SK 3	Terfasilitasnya Peningkatan Infrastruktur Pendidikan Melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai rata-rata akreditasi program studi 2. Tingkat animo pendaftar pada unit pendidikan 3. Penelitian sektor industri prioritas yang terpublikasi 4. Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat

Untuk meningkatkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel serta berorientasi pada layanan prima di unit pendidikan tinggi vokasi ditetapkan sasaran kegiatan beserta indikator kinerja sasaran kegiatan pada tabel 2.7.

Tabel 2. 7 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK 4 Politeknik ATK Yogyakarta

Kode	Tujuan (TJ) / Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Tujuan (IKT) / Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
SK 4	Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pendidikan Tinggi Vokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah pada Poltek 2. Nilai SAKIP Poltek 3. Penilaian dan analisis laporan keuangan Poltek 4. Indeks profesionalitas ASN pada Poltek 5. Indeks kinerja pelaksanaan anggaran pada Poltek 6. Survey kepuasan masyarakat 7. Nilai hasil pengawasan kearsipan unit kearsipan pada Poltek 8. Tingkat penerapan SPBE pada Poltek 9. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pada Poltek

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Politeknik ATK Yogyakarta 2025-2029

3.1.1 Pengembangan Pendidikan *Dual System* Bertaraf Global

Indonesia sedang gencar-gencarnya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi untuk mencapai standar *World Class University* (WCU). Hal ini sejalan dengan target pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, agar Indonesia menjadi negara industri maju di tahun 2035 dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Oleh karena itu, Politeknik ATK Yogyakarta didorong untuk meraih akreditasi dan sertifikasi internasional. Pengakuan global ini sangat krusial agar lulusan lebih mudah bersaing di pasar kerja global. Begitu juga dosen dan mahasiswa, mereka bisa lebih leluasa berpartisipasi dalam program pertukaran dan kolaborasi internasional. Akreditasi internasional menjadi dasar untuk merencanakan strategi akademik dan mengevaluasi capaian pembelajaran. Dengan begitu, kualitas pendidikan di Politeknik ATK Yogyakarta akan terus meningkat dan sesuai dengan standar global.

1. Pendidikan *Dual System*

Politeknik ATK Yogyakarta telah menerapkan pendidikan sistem ganda (*dual system*) dengan menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktek kerja industri. Penerapan pendidikan system ganda dengan model pembelajaran kurikulum 4-2 (4 semester di kampus dan 2 semester praktek kerja industri) dirancang untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Karakteristik utama pendidikan sistem ganda yaitu kurikulum disusun bersama antara pihak kampus dan industri agar menjamin materi yang diajarkan di kelas sesuai dengan praktik yang dibutuhkan di lapangan. Mahasiswa menghabiskan sebagian besar waktu mereka di kampus untuk teori dan dasar-dasar keahlian, dan sebagian waktu lainnya di industri untuk praktik langsung. Industri tidak hanya menjadi tempat magang, tetapi juga berperan aktif dalam proses pendidikan dengan menyediakan pembimbing lapangan, fasilitas, dan bahkan terlibat dalam evaluasi mahasiswa. Lulusan Politeknik ATK Yogyakarta mendapatkan ijazah, sertifikasi kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang membuktikan bidang keahliannya, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).

Tahapan Pendidikan sistem ganda yang diterapkan di Politeknik ATK Yogyakarta, yaitu:

- a. Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI), dengan tahapan Politeknik ATK Yogyakarta menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di dunia kerja dengan meningkatkan kolaborasi bersama praktisi industri. Politeknik ATK Yogyakarta akan menambah jumlah dosen praktisi di setiap program studi untuk memperkaya proses pembelajaran dengan pengalaman nyata. Selain itu, Politeknik

ATK Yogyakarta juga akan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas industri seperti unit produksi/*teaching factory* sebagai laboratorium nyata bagi mahasiswa.

- b. Penerapan kurikulum *link and match* dengan industri, dengan tahapan Politeknik ATK Yogyakarta melibatkan industri secara langsung sejak tahap awal penyusunan kurikulum. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua mata kuliah relevan dengan kebutuhan industri saat ini maupun di masa depan. Keterlibatan industri bukan hanya sebagai verifikator, melainkan mitra aktif dalam merancang kompetensi lulusan, menyelaraskan kurikulum, dan menerapkan sistem pembelajaran yang sesuai standar. Model pembelajaran kurikulum 4-2 mewajibkan mahasiswa untuk menjalani praktik kerja industri selama satu tahun. Langkah ini diambil agar kompetensi yang didapatkan mahasiswa sesuai dengan permintaan DUDI. Dengan konsistensi dalam kolaborasi ini, Politeknik ATK Yogyakarta optimis dapat menghasilkan lulusan vokasi yang berkualitas, siap kerja, dan mampu langsung terserap oleh industri.
- c. Revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran, dengan tahapan Politeknik ATK Yogyakarta melakukan revitalisasi untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembelajarannya agar setara dengan standar industri. Tujuannya adalah mahasiswa dapat langsung beradaptasi dengan sistem kerja industri, sehingga lebih siap dan kompeten saat memasuki dunia profesional.
- d. Peningkatan kualitas dan kompetensi dosen dan PLP, dengan tahapan peningkatan pelatihan dosen dan PLP sesuai kompetensi. Keterlibatan dosen praktisi atau instruktur dari industri untuk mengajar. Peningkatan pemagangan dosen dan PLP di industri.
- e. Penguatan sertifikasi kompetensi, dengan tahapan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industry dengan menambah skema kompetensi dan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

2. Metode Pembelajaran *Outcome-Based Education* (OBE)

Outcome-Based Education (OBE) adalah landasan filosofis dan konseptual yang menentukan apa yang harus dicapai oleh lulusan. Sedangkan pendidikan sistem ganda adalah metode implementasi praktis yang paling efektif untuk mewujudkan luaran tersebut.

Pada perancangan kurikulum, OBE memulai proses dengan mengidentifikasi luaran kompetensi yang spesifik dan terukur, seperti "mampu melakukan *troubleshooting* pada mesin *injection molding*". Pendidikan sistem ganda kemudian menyediakan kurikulum terstruktur yang membagi pembelajaran menjadi dua yaitu teori di kampus dan praktek kerja di industri. Bagian praktek di industri inilah yang secara langsung melatih mahasiswa untuk mencapai luaran yang sudah ditetapkan oleh kerangka OBE.

Pada proses pembelajaran, OBE menuntut adanya pembelajaran yang berfokus pada kinerja. Artinya, mahasiswa harus bisa menunjukkan kemampuannya secara nyata. Pendidikan sistem ganda memfasilitasi hal ini dengan menjadikan lingkungan industri sebagai 'laboratorium' di mana

mahasiswa dapat belajar dan bekerja dengan peralatan asli, di bawah bimbingan praktisi profesional.

Pada sistem penilaian, OBE menekankan pada penilaian yang mengukur pencapaian luaran. Pendidikan sistem ganda menyediakan bukti langsung dari pencapaian tersebut. Laporan magang, penilaian dari pembimbing lapangan, dan tugas yang dikerjakan di perusahaan menjadi bukti konkret bahwa mahasiswa telah menguasai luaran pembelajaran.

Jadi, dengan menerapkan pendidikan sistem ganda di bawah kerangka OBE, Politeknik ATK Yogyakarta memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pendidikan, dari perancangan kurikulum hingga evaluasi, diarahkan pada satu tujuan yaitu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi nyata yang diakui dan dibutuhkan oleh industri.

3. Pengembangan Pendidikan berstandar global

Untuk memastikan kualitas pendidikan diakui secara global, Politeknik ATK Yogyakarta diharapkan mengadopsi standar internasional. Dalam pelaksanaannya, Politeknik ATK Yogyakarta akan didorong untuk mendapatkan akreditasi internasional. Berikut adalah tahapan yang dilalui oleh perguruan tinggi atau program studi:

1. Tahap Persiapan dan Penilaian Diri, yaitu fondasi dari seluruh proses. Institusi membentuk tim internal untuk mempelajari standar dan kriteria dari badan akreditasi yang dipilih. Tim kemudian melakukan penilaian diri secara mendalam untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Semua aspek mulai dari kurikulum, kualifikasi dosen, fasilitas, hingga capaian lulusan dianalisis untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditargetkan.
2. Tahap Pengajuan dan Verifikasi Dokumen, yaitu setelah penilaian diri selesai maka institusi secara resmi mengajukan permohonan akreditasi. Bersamaan dengan itu, mereka mengirimkan dokumen yang komprehensif, termasuk laporan penilaian diri, data capaian mahasiswa, deskripsi kurikulum, dan bukti-bukti lain yang mendukung klaim kualitas. Badan akreditasi akan meninjau dokumen ini untuk menentukan apakah institusi sudah layak untuk dievaluasi lebih lanjut.
3. Tahap Kunjungan Lapangan, yaitu jika dokumen dianggap memadai, tim penilai dari badan akreditasi akan melakukan kunjungan langsung ke kampus. Selama kunjungan ini, tim akan memverifikasi informasi yang tertera dalam dokumen. Mereka akan berinteraksi langsung dengan mahasiswa, dosen, staf, dan alumni. Tim juga akan memeriksa fasilitas pembelajaran, laboratorium, dan sarana prasarana lainnya untuk memastikan semuanya memenuhi standar yang ditetapkan.
4. Tahap Evaluasi dan Keputusan, yaitu berdasarkan laporan penilaian diri dan hasil kunjungan lapangan, tim penilai menyusun laporan akhir. Laporan ini berisi temuan, rekomendasi perbaikan, serta penilaian umum terhadap program studi atau institusi. Laporan ini kemudian diserahkan kepada komite keputusan dari badan akreditasi, yang akan memberikan keputusan akhir.

3.1.2 Melaksanakan Penelitian Terapan yang Sesuai Dengan Kebutuhan Industri

Melaksanakan penelitian terapan yang sesuai dengan kebutuhan industri merupakan cara efektif untuk menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan dunia kerja. Penelitian jenis ini berfokus pada pemecahan masalah praktis yang dihadapi oleh industri, bukan sekadar pengembangan teori.

Pelaksanaan Penelitian Terapan yaitu:

1. Identifikasi Kebutuhan Industri: Langkah pertama adalah berinteraksi langsung dengan pelaku industri untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, atau peluang inovasi yang mereka hadapi. Ini bisa dilakukan melalui survei, lokakarya, atau pertemuan rutin.
2. Kolaborasi dan Kemitraan: Peneliti dari Politeknik ATK Yogyakarta bekerja sama dengan tim riset dari industri. Kolaborasi ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya relevan, tetapi juga dapat diimplementasikan.
3. Fokus pada Solusi Praktis: Hasil penelitian harus berupa solusi yang bisa langsung diterapkan oleh industri, seperti *prototype* produk baru, metode produksi yang lebih efisien, atau teknologi yang dapat meningkatkan kualitas.
4. Transfer Pengetahuan: Politeknik ATK Yogyakarta memiliki peran penting dalam mentransfer hasil penelitian ke industri melalui pelatihan, publikasi, atau presentasi.

Dengan pendekatan ini, penelitian terapan tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada kemajuan industri, inovasi, dan peningkatan daya saing.

Politeknik ATK Yogyakarta fokus pada rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan sektor industri kulit, produk kulit/alas kaki, karet, dan plastik. Oleh karena itu, riset yang dilakukan juga terpusat pada bidang-bidang tersebut untuk membantu industri memenuhi permintaan pasar. Untuk menunjukkan kualitas ilmiah dan kredibilitas global, Politeknik ATK Yogyakarta menargetkan publikasi hasil penelitiannya di jurnal internasional. Langkah ini menegaskan bahwa riset mereka diakui dan relevan di kancah global.

3.1.3 Terselenggaranya Pengabdian kepada Masyarakat Industri dalam Pengembangan Ekosistem Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang berfokus pada industri kecil dan menengah (IKM) merupakan peran vital bagi perguruan tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah membantu IKM meningkatkan daya saing melalui berbagai program yang relevan dengan tantangan mereka.

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat yaitu:

1. Pelatihan dan Pendampingan Teknis: Tim dari perguruan tinggi dapat memberikan pelatihan teknis kepada pelaku IKM untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi. Misalnya, pelatihan penggunaan mesin baru, pengolahan bahan baku, atau penerapan standar mutu. Pendampingan ini memastikan pelaku IKM dapat mengaplikasikan pengetahuan yang mereka dapatkan.
2. Peningkatan Inovasi dan Desain Produk: IKM sering kali kesulitan dalam berinovasi. Tim pengabdian dapat membantu dalam pengembangan produk baru, perbaikan desain, atau

penggunaan teknologi digital untuk pemasaran. Ini bertujuan agar produk IKM lebih menarik dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

3. Penguatan Manajemen dan Keuangan: Banyak IKM yang memiliki produk berkualitas, namun lemah dalam manajemen bisnis. Perguruan tinggi dapat memberikan pendampingan dalam aspek manajemen, seperti pembukuan sederhana, strategi pemasaran digital, dan pengelolaan rantai pasok.
4. Fasilitasi Akses ke Jaringan: Tim pengabdian dapat memfasilitasi IKM untuk terhubung dengan pihak-pihak lain, seperti pemasok bahan baku, lembaga keuangan, atau pasar yang lebih besar.

Dengan berfokus pada kebutuhan spesifik IKM, pengabdian masyarakat akan menghasilkan dampak nyata, tidak hanya meningkatkan kapasitas IKM tetapi juga memperkuat ekosistem industri di tingkat lokal maupun nasional.

Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Pengabdian kepada Masyarakat Terprogram yang dilakukan secara terencana, yaitu:
 - a. Berbasis riset;
 - b. Sesuai ranah keilmuan;
 - c. Waktu minimal 3 bulan;
 - d. Melalui proses seleksi tim pakar;
 - e. Memiliki output.
2. Kegiatan PkM yang dilakukan tidak terikat waktu, tidak terencana dan tidak diprogramkan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas dasar permintaan/kebutuhan masyarakat/ luar institusi, kerjasama dengan lembaga sebagai sponsor atau kondisi bencana. Ketentuan PkM Insidental adalah sebagai berikut:
 - a. Ada Permintaan dari Masyarakat/Lembaga;
 - b. Ditindak lanjuti dalam bentuk MOU/MOA;
 - c. Waktu penyelenggaraan sesuai kebutuhan;
 - d. Sesuai ranah keilmuan.

3.1.4 Terwujudnya Pendirian *Digital Capability Center* (DCC) Sebagai Pusat Inovasi dan Pengembangan Industri 4.0

Implementasi industri 4.0 memiliki peluang berupa 20 juta lapangan pekerjaan baru serta tantangan *reskilling* dan *upskilling* tenaga kerja mencapai 6 hingga 29 juta pekerjaan pada tahun 2030. Mengantisipasi hal ini, pengembangan pendidikan vokasi harus mampu mengadaptasi perubahan melalui pengembangan dan implementasi kurikulum industri 4.0 dalam penyelenggaraan pendidikan sekaligus menyiapkan Politeknik dan Akademi Komunitas sebagai *showcase* dan *capability center* industri 4.0 khususnya untuk industri kecil dan menengah yang akan menjadi bagian (satelit) dari Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0).

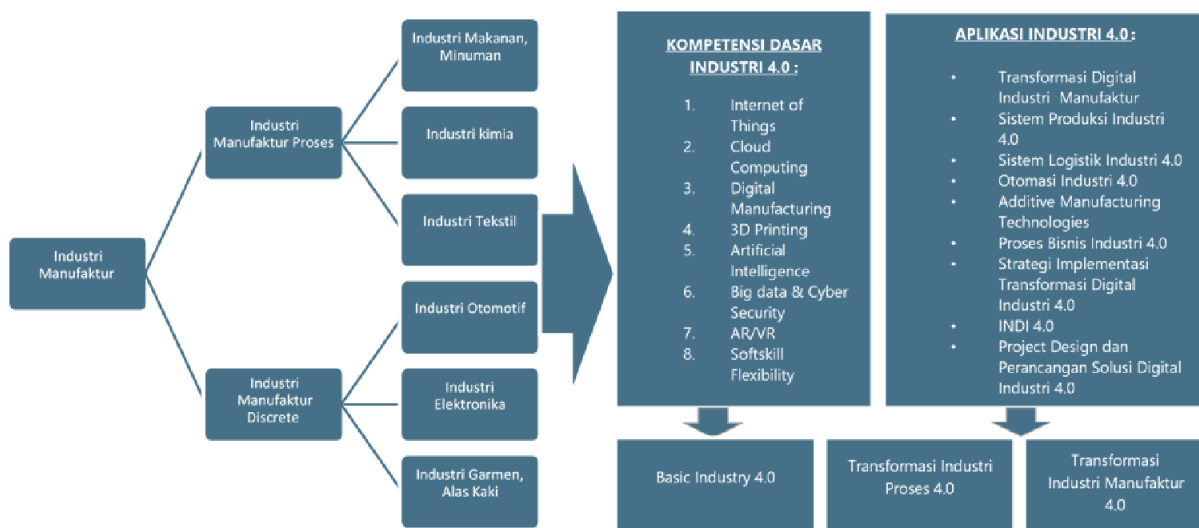
1. Pembangunan Satelit PIDI 4.0

Beberapa hal yang harus dipersiapkan Politeknik ATK Yogyakarta untuk menjadi satelit PIDI 4.0 sebagai berikut:

1. Produk dan layanan satuan kerja (*Lab/Teaching Factory/Workshop*) dinilai dari ketersediaan model proses manufaktur produk yang sudah terintegrasi (RFID, *interface* koneksi ke internet, *condition monitoring*, GPS, *barcode*).
2. Teknologi satuan kerja (*Lab/Teaching Factory/Workshop*) dinilai dari penerapan keamanan *cyber* untuk mendukung konektivitas M2M (komunikasi antar mesin) dan antar satuan kerja dengan teknologi dan digitalisasi.
3. Operasi *Lab/Teaching Factory/Workshop* dimana data disimpan serta diintegrasikan dengan rantai pasok logistik secara *real time* dengan proses otomasi serta menerapkan sistem perawatan mesin secara *real time & OEE monitoring system*.
4. Kapabilitas satuan kerja memiliki tempat pelatihan dengan pengajar, fasilitas penunjang yang memadai, serta penerapan kurikulum pelatihan sesuai dengan modul dan fasilitas/alat yang dimiliki.

2. Implementasi Kurikulum dan Modul Pembelajaran 4.0

Untuk menghasilkan lulusan Pendidikan vokasi yang adaptif dengan perkembangan revolusi industri 4.0, model pengembangan kurikulum, silabus dan modul pembelajaran industri 4.0 harus mulai



Gambar 3. 1 Kurikulum dan Modul Pembelajaran 4.0

Kurikulum industri 4.0 akan diimplementasikan di tahun pertama, dengan pembagian sebagai berikut:

1. *Basic* industri 4.0
 - a. Topik pembelajaran: dasar revolusi industri 4.0 dan peta jalan industri 4.0 (smart industri), teknologi kunci industri 4.0 dan aplikasinya, peranan data informasi dan kolaborasi organisasi industri 4.0
 - b. Penerapan pada unit pendidikan: seluruh prodi politeknik/AK dan SMK

2. Transformasi industri proses 4.0
 - a. Topik pembelajaran: proses bisnis industri manufaktur proses, strategi transformasi industri 4.0, perencanaan solusi digital sesuai proses bisnis industri manufaktur proses
 - b. Penerapan pada unit pendidikan: Prodi industri manufaktur proses (industri tekstil, industri kimia, industri makanan dan minuman, industri kulit, industri logam, atau logistic)
3. Transformasi industri diskrit 4.0
 - a. Topik pembelajaran: Proses bisnis industri manufaktur diskrit, strategi transformasi industri 4.0, perancangan solusi digital sesuai proses bisnis industri manufaktur diskrit
 - b. Penerapan pada unit pendidikan: Prodi industri manufaktur diskrit (otomotif, elektronika, alas kaki, *furniture*, permesinan, atau logistik)

3.1.5 Terselenggaranya Pendampingan *Tenant* Wirausaha Industri

Program Inkubator Bisnis merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada Peserta Inkubasi (*Tenant*). *Tenant* inkubator bisnis di Perguruan Tinggi adalah mahasiswa tingkat akhir yang telah memiliki prospektif usaha.

Adapun tahapan kegiatan inkubator bisnis di perguruan tinggi, meliputi:

1. Tahap Pra Inkubasi
Pada tahap ini dilaksanakan proses sosialisasi, pendaftaran, dan seleksi peserta. Setelah memiliki *tenant*, peserta akan diberikan penguatan materi pada produksi, pemasaran, dan kelayakan usaha.
2. Tahap Inkubasi
Pada tahap ini, *tenant* akan diberikan bantuan pendampingan berupa konsultasi dan mentoring dalam menjalankan usaha.
3. Tahap Pasca Inkubasi
Pada tahap ini dilaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan proses inkubator bisnis. Proses inkubasi dilaksanakan sampai tahap penyiapan *tenant* menjadi usaha mandiri.

3.1.6 Mengembangkan Skema Kompetensi dan Uji Kompetensi LSP

Hal pertama yang diperlukan dalam pengembangan skema uji kompetensi adalah standar acuannya. Standar acuan ini dapat mengacu pada SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), standar internasional, atau standar khusus. SKKNI adalah standar yang dirumuskan oleh berbagai stakeholder di Indonesia khususnya industri terkait untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di tempat kerja. Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional. Standar khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi atau industri untuk memenuhi tujuan organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan. Setelah standar acuan ditetapkan maka langkah

selanjutnya adalah penyusunan skema sertifikasi yang dibutuhkan oleh industri.

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan skema adalah:

1. Keterlibatan pakar yang sesuai;
2. Penggunaan struktur yang tepat serta mewakili para pemangku kepentingan, tanpa ada yang mendominasi;
3. Pengenalan dan penyesuaian pra-syarat dengan persyaratan kompetensi, jika diberlakukan;
4. Pengenalan dan penyesuaian tatacara penilaian dengan persyaratan kompetensi;
5. Analisis kerja atau praktek yang dilakukan dan diperbarui.

Adapun prosedur pengembangan skema kompetensi adalah sebagai berikut.

1. Menginterpretasi persyaratan pengembangan skema sertifikasi.
2. Mengembangkan struktur skema sertifikasi
3. Validasi skema sertifikasi
4. Memelihara skema sertifikasi

3.1.7 Mengembangkan Kelas Industri

Kelas industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis sesuai standar industri tertentu yang akan langsung bekerja pada industri. Penyiapan kelas industri dilakukan melalui program pendidikan setara D1.

Tujuan program ini adalah membekali calon tenaga kerja dengan keahlian terapan atau keterampilan teknis yang diperlukan untuk bidang pekerjaan tertentu yang ditempuh selama 1 (satu) tahun dan lulusannya langsung ditempatkan bekerja dalam rangka meningkatkan daya saing industri.

Program ini diawali dengan permintaan industri akan tenaga kerja yang kompeten untuk level 3 (tiga) atau setara dengan operator pada bidang tertentu kepada Kementerian Perindustrian dengan melakukan peninjauan terlebih dahulu terhadap unit-unit yang terkait. Apabila kesepakatan bersama diperoleh maka dilanjutkan kerjasama tertulis berupa MoU sebagai dasar untuk penyelenggaraan program pendidikan setara D1 kerjasama industri.

3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, dan mendorong dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Adapun beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1	Surat Keputusan Direktur tentang Penerima Beasiswa Akademik dan Non Akademik	PP Tarif PNB No 54 Tahun 2021	Politeknik ATK Yogyakarta	- Program Studi Akademik, dan - Sub Bagian Kemahasiswaan, Kerjasama - Bagian Keuangan	2026
2	Surat Keputusan Direktur tentang Penyusunan Kurikulum Berbasis STEM	Keputusan Menteri Perindustrian No. 1009 Tahun 2021 tentang Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global Menuju <i>Corporate University</i> BPSDMI Kementerian Perindustrian	Politeknik ATK Yogyakarta	- Program Studi Akademik, dan - Sub Bagian Kemahasiswaan, Kerjasama - BPSDMI	2026
3	Surat Keputusan Direktur tentang Keringanan SPP Mahasiswa	PP Tarif PNB No 54 Tahun 2021	Politeknik ATK Yogyakarta	- Sub Bagian Akademik, dan Kemahasiswaan, Kerjasama - Bagian Keuangan	2026
4	Surat Keputusan Direktur tentang SOP Evaluasi Kegiatan dan Program	Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Politeknik ATK Yogyakarta	- Sub Bagian Umum & Keuangan - Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Perencanaan	2026
5	Surat Keputusan Direktur tentang Pemberian <i>Reward and Punishment</i>	- PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil - PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	Politeknik ATK Yogyakarta	- Sub Bagian Umum & Keuangan - Bagian Kepegawaian	2026
6	Surat Keputusan Direktur tentang Pengaturan Kelebihan Beban Mengajar Dosen	- Permendikti Sainstek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai Standar Biaya Masukan	Politeknik ATK Yogyakarta	- Program Studi Akademik, dan - Sub Bagian Kemahasiswaan, Kerjasama	2027
7	Surat Keputusan Direktur tentang Pelaksanaan Fasilitasi <i>Silver Expert</i>	Peraturan Kepala BPSDMI nomor 7 tahun 2023 tentang <i>Silver Expert</i>	Politeknik ATK Yogyakarta	- Sub Bagian Umum dan Keuangan - BPSDMI	2027
8	Surat Keputusan Direktur tentang Panduan Pelaksanaan Kelas Industri	Keputusan Menteri Perindustrian No. 1009 Tahun 2021 tentang Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global Menuju <i>Corporate University</i> BPSDMI	Politeknik ATK Yogyakarta	- Program Studi Akademik, dan - Sub Bagian Kemahasiswaan, Kerjasama	2026

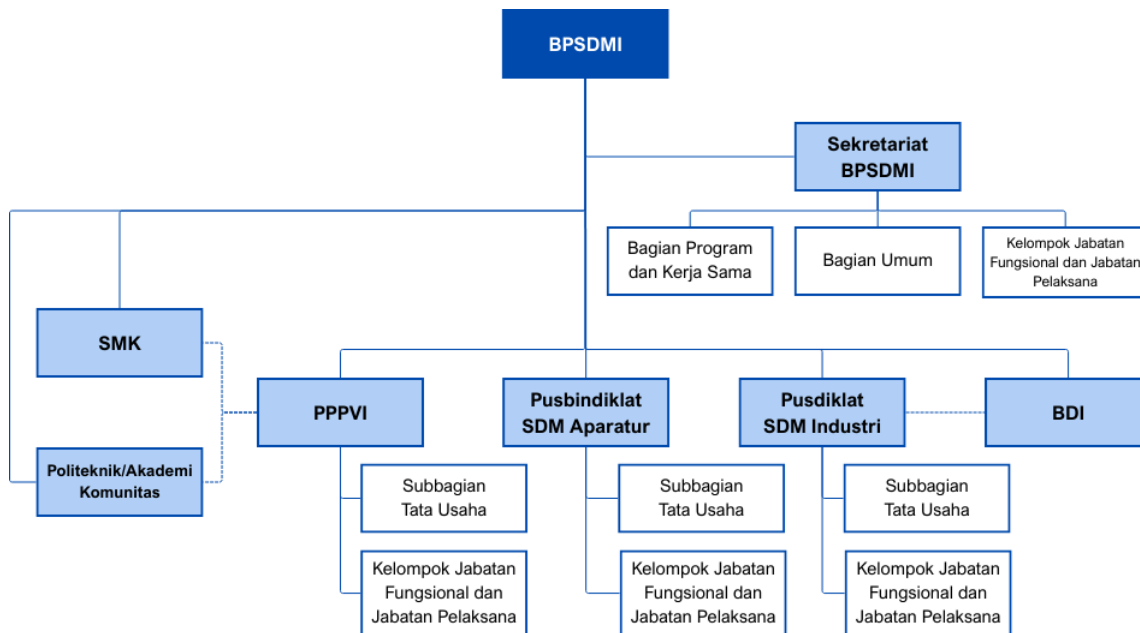
		Kementerian Perindustrian			
--	--	---------------------------	--	--	--

3.3 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik ATK Yogyakarta, Politeknik ATK Yogyakarta adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi vokasi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan sektor industri kulit, produk kulit/alas kaki, karet, dan plastik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Politeknik ATK Yogyakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menghasilkan lulusan diploma tiga yang kompeten sesuai kebutuhan industri dengan menerapkan pembelajaran *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM) berstandar global dan Pendidikan sistem ganda;
- b. Menghasilkan penelitian terapan untuk pemecahan permasalahan di sektor industri kulit, produk kulit/alas kaki, karet, dan plastik;
- c. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ekosistem Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM);
- d. Terwujudnya layanan transformasi digital industry 4.0 melalui pembangunan *Digital Capability Centre* (DCC) sebagai satelit Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0);
- e. Menghasilkan wirausaha industri melalui inkubator bisnis industri yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- f. Meningkatnya skema kompetensi dan uji kompetensi di Politeknik ATK Yogyakarta; dan
- g. Terwujudnya kelas industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri (*tailor made*).

Adapun sebagai bagian dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Vokasi Industri (PPPVI), posisi dan struktur Politeknik ATK Yogyakarta berada dibawah PPPVI sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Struktur Kelembagaan BPSDMI
 Sumber: Diolah dari (Permenperin No. 1/2025)

Struktur kelembagaan BPSDMI di atas memberikan landasan yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung visi “vokasi industri bertaraf global” dan pencapaian target RIPIN 2015-2035, namun masih ada batasan yang memengaruhi efektivitas struktur kelembagaan BPSDMI, antara lain: keterbatasan otonomi, lemahnya koordinasi lintas K/L, terbatasnya kapasitas internal, serta ketimpangan pemerataan di daerah.

Sebagai unit eselon I, BPSDMI bergantung pada arahan dan anggaran dari Kemenperin. Hal ini dapat membatasi fleksibilitas dalam mengambil keputusan cepat atau mengejar inisiatif inovatif. Misalnya, ekspansi program ke daerah terpencil atau investasi besar dalam teknologi mungkin terhambat oleh proses birokrasi atau prioritas anggaran nasional yang lebih luas, seperti yang dialokasikan untuk pendidikan dasar atau infrastruktur.

Struktur kelembagaan BPSDMI tidak memiliki mekanisme maupun wewenang yang cukup kuat untuk mengoordinasikan lintas kementerian/lembaga secara mandiri. Ketergantungan pada forum koordinasi tingkat tinggi (misal, rapat menteri) sering kali tidak cukup efektif dalam menyelesaikan tumpang tindih kebijakan, terutama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)¹⁹ untuk urusan vokasi umum, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk urusan penempatan kerja, atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk urusan riset teknologi. Hal ini dapat memperlambat sinkronisasi kebutuhan SDM dengan pasar kerja atau inovasi industri.

¹⁹ Kemendikbudristek pada periode ini dipecah menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kementerian Dikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kementerian Diktisaintek), dan Kementerian Kebudayaan. Maka dari itu, pada periode 2025-2029, BPSDMI akan berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk urusan vokasi pendidikan menengah dan Kementerian Diktisaintek untuk vokasi pendidikan tinggi.

Lebih lanjut, struktur kelembagaan saat ini belum optimal meningkatkan kapasitas SDM internal BPSDMI baik secara kualitas maupun kuantitas. Mengelola puluhan unit pendidikan dan pelatihan membutuhkan tenaga ahli, pelatih, dan staf administrasi yang memadai, tetapi rekrutmen atau peningkatan kompetensi internal kerap kali terbatas oleh regulasi kepegawaian pemerintah dan anggaran. Ini rentan menjadi *bottleneck* terutama jika skala program BPSDMI semakin besar dan semakin luas dampaknya.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk periode 2025-2029, Politeknik ATK Yogyakarta akan melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Tabel 4. 1 Target Kinerja Politeknik ATK Yogyakarta 2025-2029

Kode	Tujuan (TJ)/Sasaran Kinerja (SK)	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi	1 Persentase SDM Industri yang Kompeten *	Persen	90	90,5	91	91,5	92
SK 1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi	1 Persentase Lulusan Peserta Didik yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri *	Persen	90	90,5	91	91,5	92
		2 Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri yang Tumbuh	Tenant	1	1	2	2	2
SK 2	Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0	1 Nilai Aseesmen <i>Technical and Vocational Education and Training</i> (TVET) 4.0	Nilai	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05
SK 3	Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur Pendidikan melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi	1 Nilai Rata-rata Akreditasi Program Studi	Nilai	301	310	310	320	320
		2 Tingkat Animo Pendaftar pada Unit Pendidikan	Rasio	1:11	1:11,2	1:11,4	1:11,6	1:12
		3 Penelitian Sektor Industri Prioritas yang Terpublikasi	Hasil penelitian yang terpublikasi	9	10	11	12	13
		4 Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat	Perusahaan	3	3	4	4	5
SK 4	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pendidikan Tinggi Vokasi	1 Persentase Peningkatan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah pada Poltek/Akom	Persen	89	89,3	89,5	89,7	90
		2 Nilai SAKIP Poltek/Akom	Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00

Kode	Tujuan (TJ)/Sasaran Kinerja (SK)	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Poltek/Akom	Nilai	75	75,25	75,5	75,75	76
		4 Indeks Profesionalitas ASN pada Poltek/Akom	Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
		5 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Poltek/Akom	Indeks	93,4	93,4	94	94	94,5
		6 Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,3	91,3	91,7	91,7	92
		7 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan pada Poltek/Akom	Nilai	70,1	73	76	79	82
		8 Tingkat Penerapan SPBE pada Poltek/Akom	Persen	77	78	80	83	85
		9 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi pada Poltek/Akom	Persen	60	62	64	68	70

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari seluruh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik ATK Yogyakarta Periode 2025-2029 adalah:

1. Persentase SDM Industri yang Kompeten*
2. Persentase lulusan peserta didik yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri*

4.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun sebagai dasar penentuan kebutuhan anggaran dalam rangka pencapaian target yang telah ditentukan tahun 2025 - 2029. Kebutuhan anggaran di Politeknik ATK Yogyakarta menggunakan dua sumber yakni APBN dalam bentuk rupiah murni dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Kebutuhan anggaran selama lima tahun sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Politeknik ATK Yogyakarta 2025-2029

No	Kegiatan	Anggaran (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
4958.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	73.680.000	79.574.000	85.940.000	92.815.000	100.240.000
4958.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	500.380.000	540.410.000	583.645.000	630.336.000	680.764.000
4958.QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	75.000.000	81.000.000	87.480.000	94.478.000	102.036.000
4958.SAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri	1.190.850.000	1.286.118.000	1.389.007.000	1.500.130.000	1.620.141.000
6043.CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	20.000.000	100.000.000	108.000.000	116.640.000	125.971.000
6043.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	26.606.639.000	28.872.047.000	31.181.810.000	33.676.356.000	36.370.463.000
6043.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	212.827.000	229.853.000	248.241.000	268.100.000	289.548.000
6043.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	270.628.000	292.278.000	315.660.000	340.913.100	368.186.000

BAB V

PENUTUP

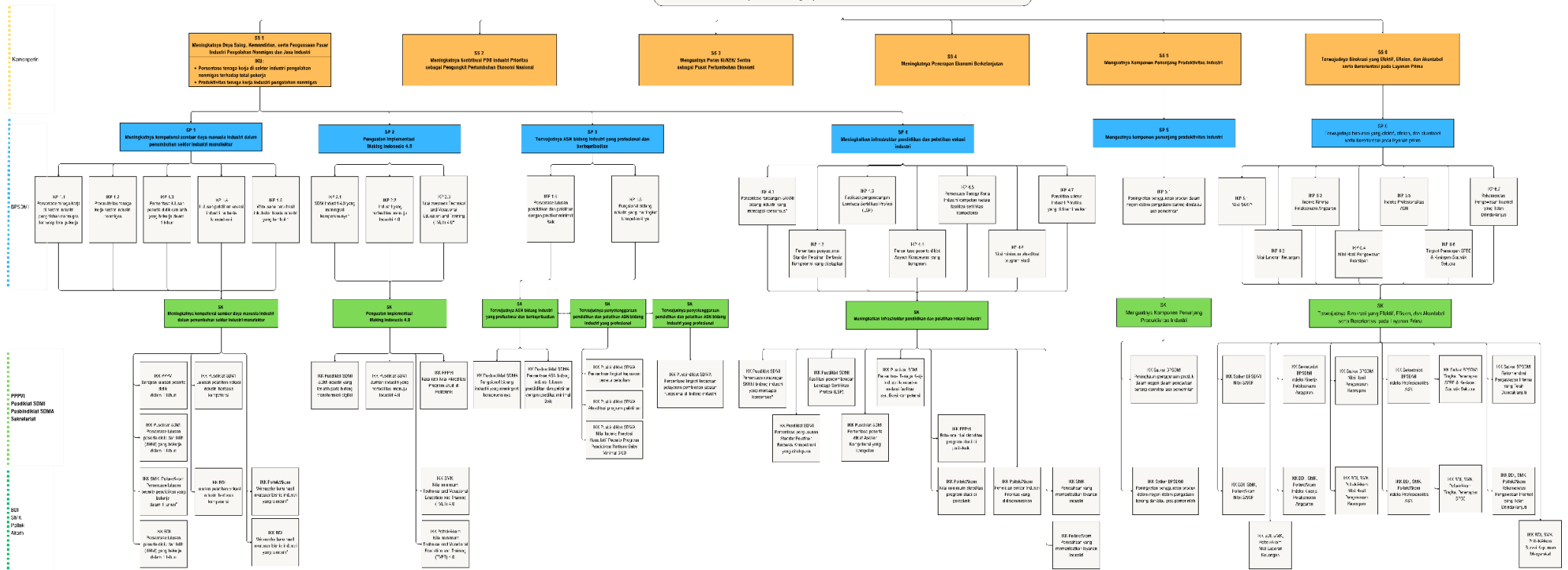
Rencana Strategis Politeknik ATK Yogyakarta dibawah Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri tahun 2025-2029 merupakan rencana kerja jangka menengah yang disusun berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Rencana strategis tersebut juga merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja dalam upaya untuk mencapai visi dan misi selama lima tahun. Penyusunan Renstra dilakukan secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis dengan menggunakan alat bantu Peta Strategi dan *Key Performance Indicator* (KPI) agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri akan direviu secara berkala setiap tahunnya dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kebijakan.

Kegiatan-kegiatan tahunan telah disusun dan direncanakan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini. Oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperkaya sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Renstra ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap-tahap pencapaian visi dan misi Politeknik ATK Yogyakarta.

Lampiran 1 Pohon Kinerja

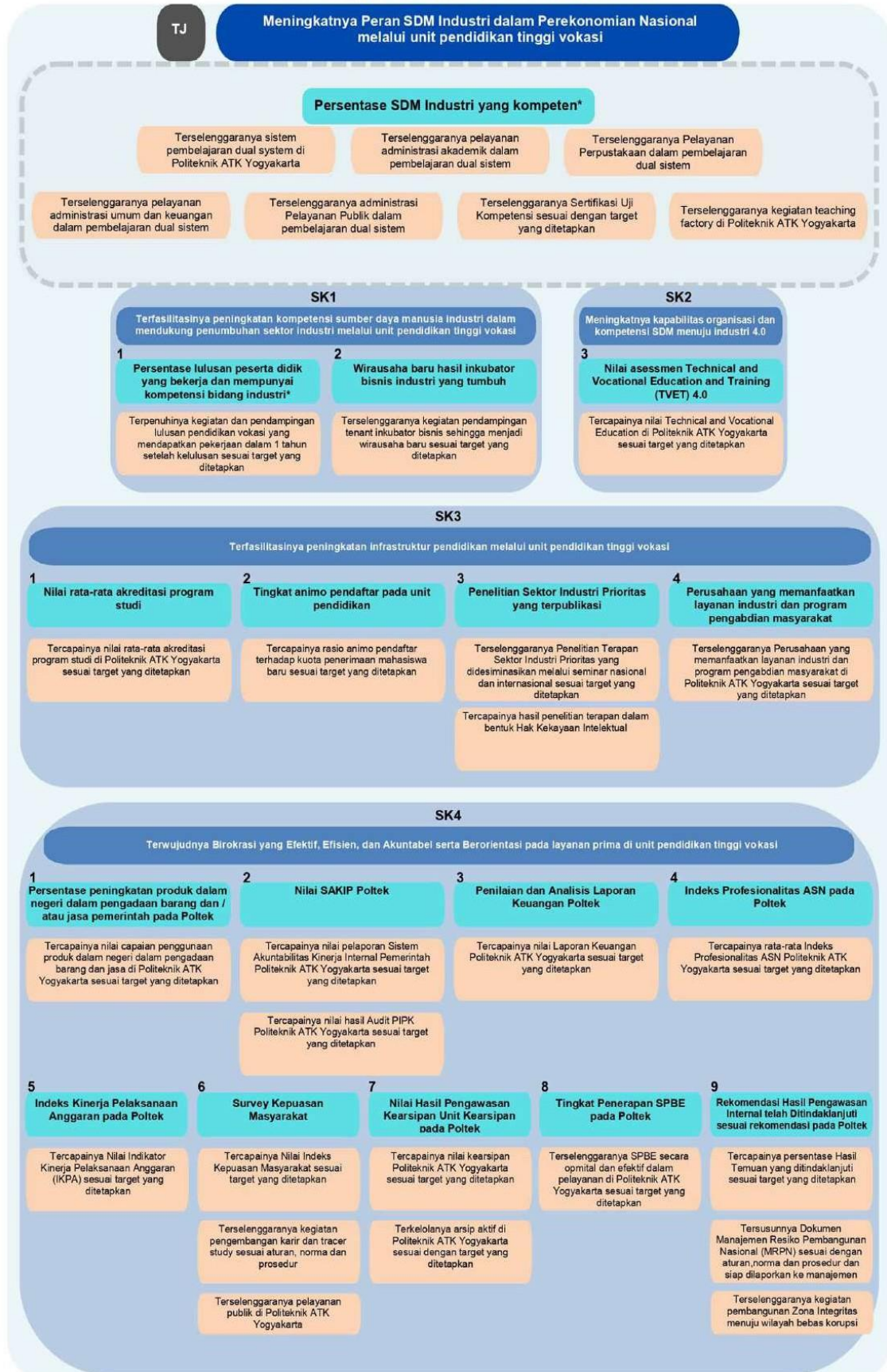
Pohon Kinerja BPSDMI 2025-2029

Tujuan Kinerja: Meningkatkan Peran Indukri dalam Perencanaan Nasional
 Tujuan BPSDMI: Meningkatkan Peran SDM Indukri dalam Perencanaan Nasional



Lampiran 2

Pohon Kinerja Politeknik ATK Yogyakarta



Lampiran 3

Matriks Kinerja dan Pendanaan Politeknik ATK Yogyakarta 2025-2029

Kode	Tujuan (TJ)/Sasaran Kinerja (SK)		Indikator Kinerja Tujuan (IKT)/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Anggaran				
				2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi	1	Persentase SDM Industri yang Kompeten *					
SK 1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi	1	Persentase Lulusan Peserta Didik yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri *	1.410.396.000	1.523.228.000	1.645.087.000	1.776.695.000	1.918.830.000
		2	Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri yang Tumbuh	75.000.000	81.000.000	87.480.000	94.478.000	102.036.000
SK 2	Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0	1	Nilai Asessmen <i>Technical and Vocational Education and Training</i> (TVET) 4.0	9.016.000	9.737.000	10.516.000	11.357.000	12.266.000
SK 3	Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur Pendidikan melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi	1	Nilai Rata-rata Akreditasi Program Studi	2.156.072.000	2.328.558.000	2.514.843.000	2.716.030.000	2.933.313.000
		2	Tingkat Animo Pendaftar pada Unit Pendidikan	48.283.000	52.146.000	56.317.000	60.823.000	65.689.000
		3	Penelitian Sektor Industri Prioritas yang Terpublikasi	15.590.000	16.837.000	18.184.000	19.639.000	21.211.000

Kode	Tujuan (TJ)/Sasaran Kinerja (SK)	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Anggaran					
			2025	2026	2027	2028	2029	
		4	Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat	62.684.000	67.698.000	73.114.000	78.963.000	85.280.000
SK 4	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pendidikan Tinggi Vokasi	1	Persentase peningkatan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah pada Poltek/Akom	36.638.000	39.569.000	42.735.000	46.154.000	49.846.000
		2	Nilai SAKIP Poltek/Akom	48.395.000	52.267.000	56.448.000	60.964.100	65.841.000
		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Poltek	61.970.000	66.928.000	72.282.000	78.065.000	84.310.000
		4	Indeks Profesionalitas ASN pada Poltek	22.310.525.000	24.095.367.000	26.022.997.000	28.104.837.000	30.353.224.000
		5	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Poltek	870.132.000	939.743.000	1.014.922.000	1.096.116.000	1.183.805.000
		6	Survey Kepuasan Masyarakat	1.680.430.000	1.951.740.000	2.107.879.000	2.276.510.000	2.458.630.000
		7	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan pada Poltek	15.990.000	17.269.000	18.651.000	20.143.000	21.754.000
		8	Tingkat Penerapan SPBE pada Poltek	20.000.000	100.000.000	108.000.000	116.640.000	125.971.000
		9	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pada Poltek	128.883.000	139.193.000	150.328.000	162.354.000	175.343.000

Lampiran 4

Matriks Keterkaitan antara Aktivitas/Kegiatan, RO, Indikator Kinerja, dan Sasaran Strategis

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan/KRO/RO/Komponen	Komponen/Subkomponen
1	2	3	4	5
TJ	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi	Persentase SDM Industri yang Kompeten *		
SK 1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi	Persentase Lulusan Peserta Didik yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri *	4958.SAG.001.051 4958.SAG.001.051 4958.SAG.001.051 4958.SAG.001.051 4958.SAG.001.054 4958.SAG.001.054 4958.SAG.001.054 4958.FAI.001.054 4958.FAI.001.054 4958.FAI.001.054	1. Kegiatan Pengembangan Kepribadian Mahasiswa, 2. Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma 3, 3. Penyelenggaraan Wisuda, 4. Kegiatan Kemahasiswaan, 5. Pelaksanaan Sertifikasi Lulusan Reguler, 6. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi, 7. Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK), 8. Kerjasama Industri, 9. Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri, 10. <i>Career Development Center</i> dan <i>Tracer Study</i>
		Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri yang Tumbuh	4958.QDJ.001.051	1. Inkubator Bisnis
SK 2	Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0	Nilai Aessmen <i>Technical and Vocational Education and Training</i> (TVET) 4.0	4958.SAG.001.051	1. Transformasi 4.0
SK 3	Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur Pendidikan melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi	Nilai Rata-rata Akreditasi Program Studi	4958.FAI.001.051 4958.SAG.001.051 4958.CBJ.002.051 6043.EBA.994.002	1. Akreditasi Perguruan Tinggi, 2. Penggandaan Buku Perpustakaan dan Sewa E-Jurnal, 3. Peralatan dan Mesin 4. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Akademi.
		Tingkat Animo Pendaftar pada Unit Pendidikan	4958.SAG.001.051 4958.SAG.001.051	1. Promosi, 2. Penerimaan Mahasiswa Baru,

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan/KRO/RO/Komponen	Komponen/Subkomponen
		Penelitian Sektor Industri Prioritas yang Terpublikasi	4958.FAI.001.052 4958.FAI.001.051 4958.FAI.001.052	1. Penelitian, 2. Jurnal Ilmiah, 3. Pengelolaan Kegiatan HKI.
		Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat	4958.SAG.001.053 4958.FAI.001.053	1. <i>Teaching Industry / Factory</i> , 2. Pengabdian Masyarakat.
SK 4	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pendidikan Tinggi Vokasi	Persentase peningkatan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah pada Poltek	6043.EBD.975.052 6043.EBA.956.052	1. Penyusunan dan Pembahasan Anggaran, 2. Pengelolaan Persediaan dan Pengelolaan Aset.
		Nilai SAKIP Poltek	6043.EBD.953.052	1. Laporan Tahunan
		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Poltek	6043.EBD.955.052	1. Pelaporan SAI
		Indeks Profesionalitas ASN pada Poltek	6043.EBC.954.053 6043.EBC.954.053 4958.FAI.001.051 4958.FAI.001.051 4958.FAI.001.051 6043.EBA.994.001 6043.EBA.994.002	1. Administrasi Kepegawaian, 2. Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai dan Penguatan Pertimbangan Kelembagaan, 3. Diklat Peningkatan Kompetensi Dosen, 4. Diklat Peningkatan Kompetensi Laboran / PLP, 5. Diklat Peningkatan Kompetensi Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum, 6. Pembayaran Gaji dan Tunjangan. 7. Peningkatan Kesehatan Pegawai
		Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Poltek	6043.EBA.994.002	1. Administrasi Perkantoran
		Survey Kepuasan Masyarakat	6043.EBA.958.052 6043.EBA.994.002 6043.EBA.994.002 6043.EBA.994.002 6043.EBA.994.002 6043.EBA.962.052 6043.EBA.994.002	1. Layanan Publik, 2. Pengadaan Pakaian Laboran, Satpam, dan Supir 3. Jasa Keamanan, 4. Jasa Pengiriman, 5. Operasional Jasa Perkantoran, 6. Protokol Pendidikan Tinggi 7. Pengelolaan Pengolahan Limbah Kulit.
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan pada Poltek	4958.EBD.974.052	1. Penatalaksanaan Kearsipan

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan/KRO/RO/Komponen	Komponen/Subkomponen
		Tingkat Penerapan SPBE pada Poltek	6043.CCL.001.051	1. Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pada Poltek	6043.EBD.953.052 6043.EBD.953.052	1. Satuan Pengendalian Internal Pemerintah, 2. Pelaksanaan Penjaminan Mutu.

Lampiran 5 Pedoman Kinerja

1. Persentase SDM Industri yang kompeten *

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi						
IK.1	Persentase SDM Industri yang kompeten	-	90	90,5	91	91,5	92
DEFINISI/DESKRIPSI							
Menurut UU No. 3/2014 Perindustrian, sumber daya industri meliputi: a) tenaga kerja industri; b) pembina industri; c) wirausaha industri; dan d) konsultan industri. SDM industri dinyatakan kompeten apabila telah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan dan/atau pemagangan untuk seluruh jenis SDM industri, serta inkubator industri khusus untuk wirausaha industri. Namun dalam penyediaan SDM Industri yang kompeten, BPSDMI berfokus pada tenaga kerja industri dan pembina industri.							
SUMBER DATA							
<p>a. Tenaga kerja industri diantaranya terdiri dari lulusan tahun berjalan dari unit pendidikan maupun pelatihan pada tahun berjalan yang lulus uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh LSP atau BNSP baik itu sertifikat kompetensi dengan logo garuda maupun paspor keterampilan (skill passport) yaitu pada pendidikan vokasi industri (SMK dan Politeknik/Akademi Komunitas Kementerian Perindustrian), pelatihan vokasi berbasis kompetensi, diklat SDM 4.0, tenaga kerja industri yang mendapatkan fasilitas sertifikat kompetensi, diklat asessor, Guru dan Dosen yang tersertifikasi, dan pelatih tempat kerja yang kompeten.</p> <p>b. Pembina industri merupakan ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi yaitu diklat teknis/struktural, diklat fungsional, dan rintisan gelar yang telah memiliki ijazah.</p>							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<p>Persentase SDM Industri yang kompeten = $\frac{\text{Jumlah SDM Industri yang lulus uji kompetensi}}{\text{Jumlah SDM Industri yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}} \times 100\%$</p> <p>Jumlah SDM Industri = Lulusan pelatihan vokasi berbasis kompetensi tahun berjalan (skilling, upskilling, reskilling) + Lulusan Poltek/Akom tahun berjalan + Lulusan SMK tahun berjalan + Lulusan diklat SDM 4.0 + Lulusan sertifikasi kompetensi industri + Lulusan Diklat Asessor + Lulusan Guru dan Dosen yang tersertifikasi + Lulusan pelatih tempat kerja + Lulusan Diklat Teknis/Struktural + Lulusan Diklat Fungsional + Rintisan Gelar</p>							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Seluruh unit dan UPT BPSDMI					

2. Persentase lulusan peserta didik yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri *

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi						
IKP 1.1	Persentase lulusan peserta didik yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri	-	90	90,5	91	91,5	92
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya industri nasional yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Tantangan perkembangan ekonomi internasional saat ini meliputi persaingan di pasar bebas tenaga kerja. Untuk menjawab tantangan tersebut, pembangunan tenaga kerja industri yang kompeten menjadi kebutuhan mendesak, yang dilaksanakan melalui pendidikan dan diklat vokasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi pada berbagai jenjang.</p> <p>Pendidikan vokasi meliputi pendidikan tinggi (politeknik dan akademi komunitas), program setara Diploma 1, serta pendidikan menengah (Sekolah Menengah Kejuruan/SMK) yang diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja kompeten. Output program ini diukur melalui persentase lulusan yang bekerja, termasuk yang berwirausaha, dan memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Persentase lulusan yang bekerja diharapkan meningkat setiap tahunnya melalui berbagai strategi peningkatan kualitas pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. Penghitungan persentase lulusan yang bekerja dilakukan paling lama satu tahun setelah dinyatakan lulus pada tahun sebelumnya (tahun-1).</p> <p>Sementara diklat vokasi berbasis kompetensi yang meliputi diklat skilling dengan skema pelatihan, sertifikasi, dan penempatan SDM Industri, merupakan program penyiapan tenaga kerja industri melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi mengacu pada standard kompetensi serta lulusannya ditempatkan bekerja pada perusahaan industri (skilling). Penyediaan SDM yang kompeten dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan pada 7 balai diklat industri di lingkungan Kementerian Perindustrian. Capaian target ini merupakan jumlah peserta program pelatihan skilling (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) yang terserap di dunia industri.</p>							
SUMBER DATA							
<p>Data program pendidikan vokasi merupakan lulusan tahun sebelumnya (t-1) dari pendidikan tinggi (politeknik dan akademi komunitas) dan pendidikan menengah (Sekolah Menengah Kejuruan/SMK) yang bekerja termasuk berwirausaha dan memiliki sertifikat kompetensi yang diakui oleh LSP atau BNSP baik itu sertifikat kompetensi dengan logo garuda maupun paspor keterampilan (skill passport).</p> <p>Data program diklat vokasi merupakan lulusan diklat skilling tahun berjalan pada balai diklat industri yang terserap atau bekerja.</p>							
$A = ((B + C + E)/(D + F) * 100\%$							
<p>Keterangan:</p> <p>A = Persentase Lulusan peserta didik dan diklat yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri</p> <p>B = Jumlah lulusan peserta didik tahun-1 yang diterima kerja dan memiliki kompetensi bidang industri</p> <p>C = Jumlah lulusan peserta didik t-1 yang berwirausaha dan memiliki kompetensi bidang industri</p> <p>D = Total peserta didik yang lulus pada t-1</p> <p>E = Jumlah lulusan peserta diklat skilling tahun berjalan yang terserap atau bekerja</p> <p>F = Total peserta diklat yang lulus pada tahun berjalan</p>							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	SMK, Poltek/Akom, BDI					

3. Wirausaha baru hasil inkubator bisnis industri yang tumbuh

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi						
IKP 1.3	Wirausaha baru hasil inkubator bisnis industri yang tumbuh	-	1	1	2	2	2
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Program Inkubator Bisnis merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada peserta inkubasi (<i>tenant</i>). <i>Tenant</i> inkubator bisnis pada Balai Diklat Industri (BDI) dan pendidikan tinggi (Politeknik/Akademi Komunitas Industri) adalah masyarakat (umum, mahasiswa, dan alumni) yang memiliki prospektif usaha. Adapun tahapan kegiatan inkubator bisnis di BDI dan pendidikan tinggi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap pra-inkubasi 2. Tahap inkubasi 3. Tahap pasca-inkubasi <p>Peserta inkubasi terdiri dari peserta yang sudah memiliki usaha atau baru mulai dari awal. <i>Output</i> dari inkubator bisnis ini adalah <i>tenant</i> yang memiliki produk yang siap dipasarkan.</p>							
SUMBER DATA							
Sertifikat tanda menyelesaikan kegiatan inkubator bisnis.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah <i>tenant</i> di inkubator bisnis BDI dan Politeknik Industri yang memiliki produk yang siap dipasarkan di tahun berjalan/memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
<i>Tenant</i>	Maksimasi	BDI, Politeknik					

4. Nilai Asesmen *Technical and Vocational Education and Training* (TVET) 4.0

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 2	Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0						
IKP 2.3	Nilai Asesmen <i>Technical and Vocational Education and Training</i> (TVET) 4.0	-	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Program "<i>Making Indonesia 4.0</i>" telah diluncurkan tahun 2018, dengan Industri 4.0 telah menjadi strategi terdepan di Indonesia. Keberadaan sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan penerapan Industri 4.0. Tantangan tersebut terkait erat dengan kemampuan institusi pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan Industri 4.0. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian yang saat ini mengelola pendidikan vokasi industri perlu melakukan penilaian terhadap kesiapan politeknik, akademi komunitas, dan SMK untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi yang dapat menghasilkan SDM Industri 4.0. Dimensi penilaian mencakup (1) kepemimpinan dan pengelolaan/manajemen, (2) keluaran dan hasil, (3) proses, (4) input. Hasil tingkat kesiapan dalam asesmen TVET 4.0 menggunakan nilai level 0 sampai dengan level 4.</p>							
SUMBER DATA							
Hasil nilai asesmen TVET 4.0 pada Politeknik, Akademi Komunitas, dan/atau SMK							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Rata-rata nilai hasil asesmen TVET 4.0 satuan kerja pada tahun berjalan, sedangkan pada satuan kerja merupakan hasil asesmen TVET 4.0							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	PPPVI, Politeknik/Akom, SMK					

5. Nilai rata-rata akreditasi program studi

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 3	Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur Pendidikan melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi						
IK 6	Nilai rata-rata akreditasi program studi	-	301	310	310	320	320
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Akreditasi Program Studi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif terhadap komitmen Program Studi dalam menjamin mutu serta kapasitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, guna menentukan kelayakan program akademik yang diselenggarakan. Proses akreditasi tersebut dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). BAN-PT merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan dan menyelenggarakan sistem akreditasi perguruan tinggi secara nasional. Selain itu, akreditasi juga dapat dilaksanakan oleh LAM, yaitu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat dan diakui oleh Pemerintah untuk melaksanakan akreditasi secara mandiri sesuai dengan ruang lingkup bidang ilmu tertentu.</p>							
SUMBER DATA							
Sertifikat akreditasi dan surat keputusan (SK) dari lembaga akreditasi.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Rata-rata nilai akreditasi merupakan hasil penghitungan rata-rata dari seluruh program studi yang telah melaksanakan proses reakreditasi pada satuan kerja pendidikan tinggi di tahun berjalan. Penghitungan ini dilakukan berdasarkan nilai akreditasi yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Nilai		Maksimasi		Politeknik/Akom			

6. Tingkat animo pendaftar pada unit pendidikan

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 3	Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur Pendidikan melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi						
IKP 4.7	Tingkat animo pendaftar pada unit pendidikan	1:11	1:11	1:11,2	1:11,4	1:11,6	1:12
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Rasio Animo Pendaftar Pendidikan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat minat masyarakat terhadap program pendidikan, khususnya pada penerimaan peserta didik baru di satuan pendidikan vokasi meliputi Politeknik, Akademi Komunitas Industri, dan Sekolah Menengah Kejuruan.</p> <p>Secara teknis, Rasio Animo Pendaftar Pendidikan dihitung dengan membandingkan jumlah pendaftar dengan jumlah peserta yang diterima atau kuota yang tersedia pada periode tertentu. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat persaingan dan besarnya minat masyarakat terhadap program pendidikan vokasi Kementerian Perindustrian. Dengan demikian, rasio ini tidak hanya menjadi tolok ukur statistik, tetapi juga berperan sebagai acuan strategis dalam pengembangan kapasitas dan kualitas pendidikan vokasi agar dapat menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten, mandiri, dan berdaya saing.</p>							
SUMBER DATA							
Data jumlah pendaftar dan data kuota penerimaan setiap unit pendidikan tinggi (politeknik dan akademi komunitas), serta pendidikan menengah (Sekolah Menengah Kejuruan/SMK)							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Rasio animo pendaftar = $\frac{\text{Jumlah pendaftar tahun berjalan}}{\text{Kuota penerimaan peserta didik tahun berjalan}}$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Rasio	Maksimasi	PPPVI, Politeknik/Akom, SMK					

7. Penelitian sektor Industri Prioritas yang terpublikasi

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 3	Terfasilitasinya peningkatan infrastruktur pendidikan melalui unit pendidikan tinggi vokasi						
IK 4.8	Penelitian sektor Industri Prioritas yang terpublikasi	-	9	10	11	12	13
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>UU No. 12/2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi wajib melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan kewajiban penelitian, perguruan tinggi dituntut untuk memiliki dosen yang kompeten dan mampu menyusun proposal, melaksanakan, dan mendiseminasikan hasil penelitian, serta menghasilkan berbagai proses dan produk teknologi, seni, dan budaya yang berujung pada Hak Kekayaan Intelektual untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian.</p> <p>Revolusi Industri 4.0 atau Fourth Industry Revolution (4IR) yang digabungkan beberapa tahun terakhir tidak hanya fokus pada pengembangan sektor industri. Lebih dari itu, revolusi industri juga memengaruhi berbagai bidang kehidupan, yaitu SDM yang kompeten, peningkatan keterampilan berbasis teknologi, serta persaingan di kancah perdagangan internasional. Peningkatan kualitas SDM bisa diwujudkan melalui penelitian terapan yang disesuaikan kebutuhan industri. Target penerapan hasil penelitian oleh politeknik dan akademi komunitas adalah publikasi hasil penelitian melalui tulisan ilmiah prosiding seminar nasional/internasional, serta jurnal ilmiah nasional terakreditasi/bereputasi internasional.</p>							
SUMBER DATA							
Data artikel penelitian yang sudah terpublikasi.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah artikel/HKI/paten yang terpublikasi baik nasional/internasional pada tahun berjalan							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Hasil penelitian yang terpublikasi	Maksimasi	PPPVI, Politeknik/Akom					

8. Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 3	Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur Pendidikan melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi						
IK 4.9	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	-	3	3	4	4	5
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Dalam upaya pengembangan kompetensi, unit pendidikan diharapkan dapat terlibat dalam pengembangan ekosistem industri dan melakukan kerja sama dengan industri dengan pola saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kerja sama ini penting bagi unit pendidikan untuk: menggali dan memahami kebutuhan dan permasalahan masyarakat; melaksanakan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan dan memanfaatkan hasil penelitian secara konkret; dan mendapatkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang memadai. Jenis kerja sama dan pengabdian masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh industri dari unit pendidikan adalah sebagai berikut: 1) pendampingan teknologi; 2) pendidikan dan pelatihan; 3) pelayanan konsultasi industri; 4) penyuluhan; dan 5) pemanfaatan lokakarya / laboratorium / teaching factory.</p>							
SUMBER DATA							
Data perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dari Politeknik / Akademi komunitas industri							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<p>Jumlah perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dari politeknik/akademi komunitas industri. Beberapa jenis implementasi indikator kinerja ini antara lain adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendampingan teknologi, Mendampingi industri dalam penerapan teknologi sesuai kebutuhan industri 2) Pendidikan dan pelatihan, Penyelenggaraan pelatihan oleh Satker kepada industri. 3) Pelayanan konsultasi industri, Penyelenggaraan layanan konsultasi teknis maupun manajemen oleh Satker kepada industri baik secara langsung maupun secara online, misalnya melalui CDC atau media lainnya. 4) Penyuluhan, Pelaksanaan penyuluhan teknis dan manajemen oleh Satker kepada Industri terkait 5) Pemanfaatan lokakarya/laboratorium/teaching factory <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan hasil pembelajaran/ pemanfaatan laboratorium oleh industri/pemanfaatan fasilitas teaching factory oleh industri. - Contoh implementasi misalnya pengujian contoh di laboratorium Satker, kerjasama pembuatan produk, dan lain sebagainya. 							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Perusahaan/Industri /IKM	Maksimasi	Politeknik/Akom					

9. Persentase peningkatan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah pada Poltek

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 4	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pendidikan Tinggi Vokasi						
IKP 5.1	Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah pada Poltek	-	89	89,3	89,5	89,7	90
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penggunaan Produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini BPSDMI.							
SUMBER DATA							
Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, 525115, 522162, dan 526112.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di kemenperin diperoleh melalui rumus:</p> $RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRA} \times 100\%$ <p>Ket:</p> <p>RP3DN = Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kemenperin</p> <p>RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN</p> <p>TotRA = Total Realisasi Anggaran berdasarkan akun</p>							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Seluruh unit Eselon II dan satuan kerja daerah di BPSDMI					

10. Nilai SAKIP Poltek

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 4	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pendidikan Tinggi Vokasi						
IKP 5.2	Nilai SAKIP Poltek	-	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja yang baik dan mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan APBN pada K/L. Penilaian SAKIP dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.							
SUMBER DATA							
Data nilai SAKIP dari hasil evaluasi APIP Kemenperin.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan Nilai SAKIP menggunakan Lembar Kerja Evaluasi berdasarkan Kepmenperin 2181 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Nilai		Maksimasi		Seluruh Unit Kerja			

11. Penilaian dan analisis laporan keuangan Poltek

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 4	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pendidikan Tinggi Vokasi						
IKP 5.3	Penilaian dan analisis laporan keuangan Poltek	-	75	75,25	75,5	75,75	76
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan.</p>							
SUMBER DATA							
Data hasil penilaian dan analisis laporan keuangan dikeluarkan oleh Biro Keuangan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<u>Tingkat Satuan Kerja</u>							
Komponen Penilaian		Bobot (%)					
1. Kesesuaian dengan SAP		24%					
2. Kecukupan Informasi		54%					
3. Efektivitas Pengendalian Internal		11%					
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan		11%					
Jumlah		100%					
<u>Tingkat Eselon I</u>							
Komponen Penilaian		Bobot (%)					
1. Kesesuaian dengan SAP		24%					
2. Kecukupan Informasi		53,5%					
3. Efektivitas Pengendalian Internal		9%					
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan		13,5%					
Jumlah		100%					
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	Seluruh Unit Eselon I dan UPT					

12. Indeks Profesionalitas ASN pada Poltek

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 4	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pendidikan Tinggi Vokasi						
IKP 5.4	Indeks Profesionalitas ASN pada Poltek	-	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN tingkat individu (PNS dan PPPK) maupun tingkat Kementerian/Lembaga yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.							
SUMBER DATA							
Layanan Indeks Profesionalitas dalam Sistem Informasi ASN (SI-ASN) Instansi Badan Kepegawaian Negara.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<p>Penghitungan IP ASN merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Penghitungan IP ASN dilakukan dengan dasar bobot 4 dimensi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dimensi Kualifikasi, terkait jenjang pendidikan formal (25%) Dimensi Kompetensi, terkait riwayat pengembangan kompetensi (40%) Dimensi Kinerja, terkait riwayat penilaian kinerja (30%) Dimensi Disiplin, terkait riwayat hukuman disiplin (5%). <p>Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai 91-100 untuk kategori sangat tinggi, 81-90 untuk kategori tinggi, 71-80 untuk kategori sedang, 61-70 untuk kategori rendah, dan ≤60 untuk kategori sangat rendah.</p> <p>Untuk kepentingan pengukuran capaian kinerja, Unit Penanggung Jawab Data dapat melakukan pengolahan dan perhitungan IP ASN Kementerian Perindustrian secara mandiri dan manual, dengan tetap mengacu pada formulasi serta data terakhir yang tersedia di BKN. Guna mendukung hal tersebut, dapat disediakan portal pembaharuan data yang memungkinkan update riwayat pengembangan kompetensi pegawai secara real-time, yang selanjutnya akan disosialisasikan oleh Unit Penanggung Jawab Data melalui nota dinas atau mekanisme lainnya.</p>							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Indeks	Maksimasi	Seluruh Unit Es. I; dan Seluruh UPT					

13. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Poltek

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 4	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pendidikan Tinggi Vokasi						
IKP 5.5	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Poltek	-	93,4	93,4	94	94	94,5
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator yang ditetapkan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Perindustrian dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.							
SUMBER DATA							
Data Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dirilis oleh Kementerian Keuangan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<p>Pengukuran IKPA merujuk pada PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Nilai IKPA pada aplikasi yang dikelola oleh DJPb untuk Kementerian/unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan 7 (tujuh) nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat Kementerian/unit Eselon I/Satker lalu dikurangi Dispensasi SPM. Dalam hal terdapat satu atau lebih indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA Kementerian/unit Eselon I/Satker dihitung sebagaimana berikut:</p> $\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot *)} - \text{Dispensasi SPM}$ <p>*) Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> konversi bobot bernilai 100 persen apabila Kementerian/unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai; dan konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada Kementerian/unit Eselon I/Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. 							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Indeks	Maksimasi	Sekretariat BPSDMI					

14. Survei Kepuasan Masyarakat

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 4	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pendidikan Tinggi Vokasi						
IKP	Survei Kepuasan Masyarakat	-	91,3	91,3	91,7	91,7	92,0
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik merupakan hasil Survei Indeks kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan Unit Pelayanan Publik (UP2) Pusat Kementerian Perindustrian. Pedoman survei mengacu pada 9 (sembilan) unsur SKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 mengenai Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang lingkup tersebut telah dikembangkan menjadi variabel/unsur sesuai dengan karakteristik pelayanan Pusat Kementerian Perindustrian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 3. Waktu Penyelesaian Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 4. Biaya/Tarif *) Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 6. Kompetensi Pelaksana **) Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 7. Perilaku Pelaksana **) Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 9. Sarana dan prasarana Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). <p>Catatan :</p> <p>*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.</p> <p>**) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.</p>							
SUMBER DATA							
Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pelayanan terkait pelatihan dan pendidikan pada satuan kerja BPSDMI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							

Pengumpulan data untuk pengukuran indeks kepuasan masyarakat dapat dilakukan melalui survey secara elektronik maupun disebarakan secara manual pada pengguna layanan Pengukuran dilakukan 1 kali dalam setahun. Hasil survey menggunakan skala 1-4.

Hasil pengolahan data kuesioner menghasilkan nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) menggunakan skala 1-4 dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Dengan formula konversi sebagai berikut :

$$NIK = NI \times 25$$

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Indeks	Maksimasi	Politeknik / Akom

15. Nilai hasil pengawasan kearsipan unit kearsipan pada Poltek

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 4	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pendidikan Tinggi Vokasi						
IKP 5.6	Nilai hasil pengawasan kearsipan unit kearsipan pada Poltek	-	70,1	73	76	79	82
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.</p> <p>Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin.</p>							
SUMBER DATA							
Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat dan Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Nilai		Maksimasi		Seluruh Unit Kerja			

16. Tingkat Penerapan SPBE pada Poltek

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 4	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pendidikan Tinggi Vokasi						
IKP 5.7	Tingkat Penerapan SPBE pada Poltek		77	78	80	83	85
DEFINISI/DESKRIPSI							
Tingkat Penerapan SPBE adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi untuk menilai pelaksanaan penerapan SPBE oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.							
SUMBER DATA							
Data Tingkat Penerapan SPBE yang dirilis oleh Pusdatin.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Tingkat Penerapan SPBE							
Komponen Penilaian						Bobot (%)	
1. TATA KELOLA SPBE						45%	
2. MANAJEMEN SPBE						25%	
3. LAYANAN SPBE						30%	
Jumlah						100%	
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Unit Eselon II Setjen dan UPT					

17. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pada Poltek

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 4	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pendidikan Tinggi Vokasi						
IKP 5.8	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pada Poltek	-	60	62	64	68	70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Menghitung penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal (audit) sampai mencapai status Sesuai Rekomendasi (SR)							
SUMBER DATA							
Tim Kerja Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, database Itjen.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<p>Nilai Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi diperoleh dengan rumus:</p> <p>A = $(B+C)/2$</p> <p>A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR)</p> <p>B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1)</p> <p>C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan</p>							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Seluruh Unit Eselon I, Unit Eselon II Setjen, dan UPT					

Lampiran 6

Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1	Surat Keputusan Direktur tentang Penerima Beasiswa Akademik dan Non Akademik	PP Tarif PNB No 54 Tahun 2021	Politeknik ATK Yogyakarta	- Program Studi - Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama - Bagian Keuangan	2026
2	Surat Keputusan Direktur tentang Penyusunan Kurikulum Berbasis STEM	Keputusan Menteri Perindustrian No. 1009 Tahun 2021 tentang Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global Menuju <i>Corporate University</i> BPSDMI Kementerian Perindustrian	Politeknik ATK Yogyakarta	- Program Studi - Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama - BPSDMI	2026
3	Surat Keputusan Direktur tentang Keringanan SPP Mahasiswa	PP Tarif PNB No 54 Tahun 2021	Politeknik ATK Yogyakarta	- Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama - Bagian Keuangan	2026
4	Surat Keputusan Direktur tentang SOP Evaluasi Kegiatan dan Program	Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Politeknik ATK Yogyakarta	- Sub Bagian Umum & Keuangan - Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Perencanaan	2026
5	Surat Keputusan Direktur tentang Pemberian <i>Reward and Punishment</i>	- PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil - PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	Politeknik ATK Yogyakarta	- Sub Bagian Umum & Keuangan - Bagian Kepegawaian	2026
6	Surat Keputusan Direktur tentang Pengaturan Kelebihan Beban Mengajar Dosen	- Permendikti Sainstek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai Standar Biaya Masukan	Politeknik ATK Yogyakarta	- Program Studi - Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama	2027
7	Surat Keputusan Direktur tentang Pelaksanaan Fasilitas <i>Silver Expert</i>	Peraturan Kepala BPSDMI nomor 7 tahun 2023 tentang <i>Silver Expert</i>	Politeknik ATK Yogyakarta	- Sub Bagian Umum dan Keuangan - BPSDMI	2027

8	Surat Keputusan Direktur tentang Panduan Pelaksanaan Kelas Industri	Keputusan Menteri Perindustrian No. 1009 Tahun 2021 tentang Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global Menuju <i>Corporate University</i> BPSDMI Kementerian Perindustrian	Politeknik ATK Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Program Studi - Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama 	2026
---	---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------